



Laporan Penelitian

Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Daniel Suryadarma

Akhmadi

Hastuti

Nina Toyamah

Desember 2005

**Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk
Penargetan Kemiskinan:
Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan
oleh Masyarakat di Indonesia**

Daniel Suryadarma

Akhmadi

Hastuti

Nina Toyamah

Lembaga Penelitian SMERU

Jakarta

Desember 2005

Ukuran obyektif kesejahteraan keluarga untuk penargetan kemiskinan: Hasil uji coba sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat di Indonesia/Oleh Daniel Suryadama et al.—Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2005. – ii, 51 hal: 31 cm. – (Laporan Penelitian SMERU Desember 2005)

ISBN 979-3872-17-9

1. Sensus penduduk

I. Suryadarma, Daniel

312/DDC 21

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN STUDI	2
III. KERJA SAMA DENGAN BKKBN	4
IV. DESA CBMS	5
V. METODOLOGI PENELITIAN	6
VI. TINJAUAN UMUM DESA-DESA CBMS	8
A. Desa Cibulakan	8
B. Desa Parakantugu	9
C. Desa Kedondong	10
D. Desa Jungpasir	12
VII. PROFIL KUANTITATIF DESA CBMS	14
A. Penduduk	14
B. Pekerjaan dan Pendidikan	15
C. Kesehatan dan Pola Konsumsi Makanan	21
D. Karakteristik Keuangan	23
E. Partisipasi Politik, Kenyamanan dan Akses pada Informasi	24
F. Status BKKBN dan Program Jaring Pengaman Sosial	25
VIII. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI DESA CIBULAKAN	28
A. Indikator Penting tentang Kesejahteraan	28
B. Karakteristik Keluarga Terkaya dan Termiskin	28
IX. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI PARAKANTUGU	33
A. Indikator Penting tentang Kesejahteraan	33
B. Karakteristik Keluarga Terkaya dan Termiskin	33
X. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI DESA KEDONDONG	37
A. Indikator Penting tentang Kesejahteraan	37
B. Karakteristik Keluarga Terkaya dan Termiskin	38
XI. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI DESA JUNGPASIR	41
A. Indikator Penting tentang Kesejahteraan	41
B. Karakteristik Keluarga Terkaya dan Termiskin	41
XII. PERBANDINGAN HASIL-HASIL PCA	46
XIII. PELAJARAN YANG DIPETIK DARI KETERLIBATAN LOKAL	48
XIV. KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Table IV.1	Karakteristik Kabupaten yang Terpilih	5
Table IV.2	Informasi Dasar mengenai Desa-desa Terpilih	5
Table V.1	Indikator Kesejahteraan Keluarga CBMS	6
Table VII.1	Karakteristik Populasi Desa dalam Lokasi Proyek CBMS	14
Table VII.2	Karakteristik Desa Proyek CBMS berkaitan dengan Pekerjaan (%)	15
Table VII.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja yang Meninggalkan Bangku Sekolah di Lokasi Proyek CBMS (%)	17
Table VII.4	Angka Partisipasi Murni dari Siswa di Lokasi Proyek CBMS (%)	19
Table VII.5	Sekolah dan Kerja bagi Anak di Lokasi Proyek CBMS(%)	20
Tabel VII.6	Karakteristik Kesehatan dan Sanitasi di Lokasi Proyek CBMS (%)	21
Table VII.7	Pola Konsumsi Makanan di Lokasi Proyek CBMS(%)	23
Table VII.8	Karakteristik Finansial di Lokasi Proyek CBMS (%)	24
Table VII.9	Partisipasi Politik, Kenyamanan dan Akses pada Informasi Lokasi Proyek CBMS (%)	25
Table VII.10	BKKBN Status BKKBN dan Penerima Manfaat JPS	26
Table VIII.1	Sepuluh Indikator Kesejahteraan yang Berperingkat Teratas di Cibulakan	28
Table VIII.2	Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin di Cibulakan	29
Table IX.1	Sepuluh Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Parakantugu	33
Table IX.2	Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin	34
Table X.1	Sepuluh Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kedondong	37
Table X.2	Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin	38
Table XI.1	Sebelas Indikator Kesejahteraan yang Berperingkat Tertinggi di Jungpasir	41
Table XI.2	Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin	42
Table XII.1	Sepuluh Variabel Berbobot Paling Tinggi di Wilayah Uji Coba CBMS	46

Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia

ABSTRAK

Laporan ini mendokumentasikan hasil dari uji coba sistem pemantauan kemiskinan baru yang memiliki tiga keunggulan dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi orang miskin. Pertama, sistem ini melibatkan masyarakat lokal, sehingga hasil yang didapat memanfaatkan pengetahuan lokal. Kedua, indikator kemiskinan yang dihasilkan peka terhadap kondisi kemiskinan lokal, akurat, dan tidak mudah "dimodifikasi". Ketiga, pemrosesan data sangat cepat dan keseluruhan kegiatan dari awal pengumpulan data hingga publikasian data hanya memakan waktu lima bulan. Mengingat luasnya ukuran geografis Indonesia dan fakta bahwa pemerintah kabupaten saat ini berwenang menentukan program pengentasan kemiskinan sendiri, kami percaya bahwa sistem pemantauan ini adalah yang paling cocok untuk diterapkan di masing-masing kabupaten di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah relatif tidak memiliki masalah yang berarti dalam melakukan pentargetan masyarakat miskin secara regional. Susenas¹ dan Podes BPS yang relatif dapat diandalkan telah menjadi pijakan dasar dalam mendistribusi dan mengalokasikan program yang dirancang secara khusus untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, beragam persoalan mulai mencuat sesaat ketika para pejabat di tingkat lokal secara serius harus mengidentifikasi mereka yang miskin dan mengidentifikasi tempat tinggalnya, karena Susenas dan Podes tidak menyediakan informasi ini. Untuk memperoleh informasi keberadaan mereka, para pelaksana program beralih ke data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional),² yang tujuan utamanya adalah untuk memantau pelaksanaan Program KB Nasional dan dengan demikian tidak cocok sebagai instrumen untuk mengidentifikasi keluarga miskin. Penggunaan data ini telah berakibat pada amat rendahnya tingkat cakupan yang dapat diraih dan terjadinya kebocoran pada program pemerintah untuk masyarakat miskin. (Suryahadi & Sumarto, "Principles and Approaches").

Karena alasan tersebut di atas, sejak krisis 1997 pentingnya mekanisme penetapan sasaran yang sesuai telah mendapat perhatian. Lebih jauh lagi, di bawah desentralisasi wewenang penentuan anggaran kepada pemerintah daerah (pemda) pada 2001 dan UU Otonomi Daerah³ yang baru yang menegaskan bahwa para gubernur, bupati dan kepala desa kini dipilih melalui proses pemilihan langsung di daerahnya, para pejabat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain harus meningkatkan kinerjanya secara serius.

Paling tidak, terdapat empat upaya penting yang dilakukan oleh pemda-pemda dalam rangka meningkatkan pemantauan masyarakat miskin dan program-program yang terkait dengan kemiskinan pada era desentralisasi: tiga di antaranya dilakukan pada 2001 oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan yang bekerja sama dengan BPS; dan yang lain sedang dilakukan di Kab. Sikka – NTT. Biaya dari masing-masing upaya "sensus masyarakat miskin" ini bukannya tidak berarti. Sensus masyarakat miskin 2001 di setiap provinsi menelan biaya sekitar 600.000 dolar AS, sementara biaya untuk pelaksanaan sensus yang tengah berlangsung di Kab. Sikka kini telah menelan 170.000 dolar AS; suatu jumlah yang amat besar untuk sebuah kabupaten di provinsi termiskin di Indonesia. Tiga sensus pada 2001 telah dihentikan, meskipun kini Jatim berencana melakukan survei kemiskinan yang baru pada 2005, sementara besar kemungkinan sensus di Sikka tidak mampu memberikan hasil yang menggembirakan.⁴ Hal ini disebabkan oleh lemahnya metodologi dan minimnya pelatihan bagi para personel.

¹ Susenas adalah survei sosioekonomi nasional yang mengumpulkan rincian data sosioekonomi rumah tangga dan individu. Survei ini mencakupi setiap kabupaten di Indonesia, meski hanya merupakan representasi hingga tingkat perdesaan/perkotaan di tingkat provinsi. Setiap tiga tahun, survei ini juga mengumpulkan data konsumsi rumah tangga secara rinci yang dipakai untuk menghitung garis kemiskinan dan angka kemiskinan di tingkat kabupaten/provinsi/nasional. Sementara Podes (potensi desa) adalah sensus tiap desa di Indonesia (saat ini terdapat 68.000 desa) yang mengumpulkan informasi mengenai infrastruktur dan fasilitas dasar di desa.

² BKKBN adalah satu-satunya badan yang setiap tahun mengumpulkan data tingkat rumah tangga di seluruh Indonesia yang berlaku hingga 10 tahun.

³ UU No. 32/2004 yang menggantikan UU lama mengenai desentralisasi No. 22/1999.

⁴ Menurut seorang peneliti SMERU yang pernah berkunjung ke Sikka, terdapat begitu banyak ketidakjelasan dan inefisiensi di antara para pejabat pemerintah setempat.

II. TUJUAN STUDI

Dalam upaya untuk memperkenalkan instrumen pemantauan yang lebih handal di Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU telah mengajukan usulan uji coba sistem pemantauan kemiskinan yang memudahkan pengumpulan data, memberikan hasil yang objektif, peka terhadap kekhasan lokal, dan memberikan hasil-hasil yang intuitif dan cepat. Karena sangat menekankan keterlibatan penduduk setempat, sistem ini disebut sebagai Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (CBMS—*Community Based Monitoring System*). Dana uji coba disediakan oleh *International Development Research Institute*, Canada melalui Tim Koordinasi Jejaring CBMS yang berbasis di *Angelo King Institute* untuk Studi-studi Ekonomi dan Bisnis, De La Salle University, Manila.

Ada beberapa perbedaan utama antara CBMS dan sistem pemantauan kemiskinan yang bersifat tradisional. Pertama, CBMS menggunakan kuesioner yang cukup sederhana yang dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat lokal, yang berarti sistem ini menggunakan pengetahuan masyarakat setempat.⁵ Dengan demikian, aparat desa dan warga masyarakat dapat memproses dan menghitung beberapa indikator tingkat desa, seperti indikator yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan sanitasi dan siap bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah.

Kedua, karena warga setempat dapat memulai menganalisis sebagian informasi tanpa perlu menunggu untuk terlebih dahulu diproses atau dianalisis di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, hasilnya dapat langsung tersedia dalam waktu yang relatif singkat dan secepatnya dapat diambil tindakan.⁶

Ketiga, CBMS peka terhadap kondisi-kondisi yang bersifat lokal. Hal ini penting karena kondisi kemiskinan seringkali berbeda bergantung pada kondisi lokalnya. Karena peka terhadap kondisi lokalnya, CBMS mampu memberikan pengarahannya bagi kebijakan yang tepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Sebaliknya, sistem pemantauan kemiskinan yang lain biasanya menggunakan seperangkat indikator kemiskinan yang sama untuk seluruh daerah, yang sering terbukti tidak efektif akibat berbagai komplikasi yang ditimbulkan oleh heterogenitas wilayah.

Terakhir, data yang dikumpulkan melalui kuesioner dapat dikirimkan ke pemda kabupaten untuk berbagai tujuan, seperti alokasi anggaran dan penetapan sasaran program. Sebagai instrumen penetapan sasaran dan dengan menggunakan metodologi yang disebut Analisis Komponen Dasar (PCA), data dapat digunakan untuk membuat indeks gabungan yang merangkum semua aspek multidimensi kemiskinan ke dalam angka bilangan tunggal untuk setiap keluarga dalam sebuah desa.⁷ Dengan demikian, aparat pemerintah dapat membuat pemeringkatan keluarga di suatu desa yang didasarkan pada kesejahteraannya.

⁵ Ini juga merupakan cara yang ditempuh BKKBN. Sebaliknya, BPS menggunakan enumeratornya sendiri untuk melakukan survei.

⁶ Berdasarkan perkiraan kami, pengumpulan data dan analisis seharusnya berlangsung selama 5 bulan, hampir sama dengan sistem BKKBN yang ada sekarang.

⁷ Penjelasan tentang Metode PCA terdapat dalam CD pada bagian PCA.

Indikator yang kini dipakai untuk penetapan sasaran hanya mengklasifikasikan keluarga ke dalam kelompok masyarakat miskin dan nonmiskin, sehingga tidak terdapat uraian lengkap mengenai keluarga mana yang termiskin di antara masyarakat miskin. Dengan pemeringkatan keluarga berdasarkan kesejahteraannya, aparat pemerintah dapat memiliki informasi mengenai keluarga termiskin atau 10% termiskin di desa tersebut. Informasi ini akan sangat penting untuk meningkatkan penetapan keakuratan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Survei ini menggunakan kuesioner rumah tangga untuk mengumpulkan data rumah tangga, dan kepala rumah tangga dan para anggota perempuan dari sebuah keluarga dapat menjadi responden bagi bagian-bagian yang relevan. Informasi tingkat desa diperoleh dengan menggunakan daftar kontrol terstruktur.⁸

Keluhan umum terhadap data BKKBN adalah bahwa data ini dapat dengan mudah disabotase. Untuk mengatasi masalah ini, variabel-variabel yang kami kumpulkan mencatat karakteristik rumah tangga secara lebih rinci; kepala desa dan enumerator tidak bakal mengetahui pentingnya setiap variabel hingga diproses; dan sabotase data setelah pemrosesan akan menyebabkan pembobotan yang telah diproses menjadi usang, sehingga hasilnya menjadi tidak valid. Singkatnya, data dan metode pemrosesan yang kami pakai menjamin sabotase data menjadi lebih sulit dan hasilnya lebih objektif.

⁸ Untuk lebih menyederhanakan proses enumerasi, tidak dilakukan diskusi kelompok (FGD) atau metode kualitatif lainnya untuk penggalan informasi.

III. KERJA SAMA DENGAN BKKBN

SMERU bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan BKKBN, baik di pusat maupun di dinas tingkat provinsi dan kabupaten dari awal proyek karena beberapa alasan. Pertama, BKKBN berpengalaman dalam melakukan sensus tingkat rumah tangga. Di hampir semua desa di Indonesia, BKKBN memiliki kader di tingkat RT yang masih terus mengumpulkan data BKKBN setiap tahun. Kedua, karena BKKBN masih akan terus mengumpulkan data di tingkat rumah tangga setiap tahun, mereka merupakan badan yang akan paling menerima manfaat dari metode CBMS yang telah diperbaiki ini. Ketiga, dalam jangka panjang SMERU mengharapkan pemda akan mengambil alih proses pemantauan yang berarti perlu dibangun kepedulian dan rasa memiliki sejak dini. Lebih lanjut, kemungkinan besar pemda akan secara resmi mengadopsi metode CBMS ini jika SMERU bekerja sama dengan badan pemerintah ketimbang melakukannya sendiri.

IV. DESA CBMS

Proyek uji coba CBMS terbatas hanya di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dua kabupaten dipilih, salah satunya merupakan kabupaten di mana hingga kini BKKBN masih beroperasi dan yang lainnya tidak lagi secara khusus memiliki lembaga/dinas sebagai kepanjangan tangan dari BKKBN. Kabupaten pertama adalah Cianjur di Jawa Barat dan lainnya adalah Demak di Jawa Tengah.

Dari setiap kabupaten, dipilih dua kecamatan dan di setiap kecamatan dipilih satu desa, hingga berjumlah empat desa. Setiap rumah tangga di desa-desa tersebut didata. Jarak dari ibu kota kabupaten ke kecamatan yang terpilih juga dipertimbangkan. Satu kecamatan berjarak jauh dari ibu kota kabupaten dan satu kecamatan lainnya berjarak dekat. Sampel tidak dimaksudkan menjadi representatif kabupaten atau kecamatan.

Tabel IV.1 Karakteristik Kabupaten yang Terpilih

Nama kabupaten	Cianjur	Demak
Jumlah kecamatan	26	14
Jumlah desa	341	247
Jumlah RW	2397	1223
Jumlah RT	9246	5910
Penduduk	2097336	991942
Jumlah rumah tangga	517337	257757
Jumlah rumah tangga prasejahtera dan sejahtera pada 2001-2002	177900	169637

Sumber: Podes 2003.

Desa-desa terpilih di Cianjur adalah Desa Parakantugu di Kecamatan Cijati dan Desa Cibulakan di Kecamatan Cugenang. Sementara desa yang terpilih di Demak adalah Desa Jungpasir di Kecamatan Wedung dan Desa Kedondong di Kecamatan Demak. Informasi dasar pada setiap desa ini dapat dilihat dalam Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Informasi Dasar Mengenai Desa-desa Terpilih

	Parakantugu	Cibulakan	Kedondong	Jungpasir
Jumlah rumah tangga	1173	1179	1164	1085
Jumlah rumah tangga prasejahtera dan rumah tangga sejahtera pada 2001-2002	226	337	668	535
Proporsi rumah tangga pertanian (%)	60	73	90	65
Jarak ke kantor kecamatan (km)	2	7	10	11
Jarak ke ibu kota kabupaten (km)	90	8	10	28

Sumber: Podes 2003.

V. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan seakurat mungkin, model yang ideal adalah mengumpulkan data pengeluaran konsumsi dari setiap rumah tangga. Akan tetapi, kendala pengumpulan data tersebut telah diakui secara luas. Di samping itu, data konsumsi tidak dapat diandalkan dan bahkan kesejahteraan rumah tangga boleh jadi dibuat berlebihan atau malah kurang. Untuk menghindarinya, kami akan membuat estimasi kekayaan rumah tangga dalam jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang telah diperkenalkan dan dipertahankan oleh Filmer dan Pritchett (“Estimating Wealth”). Metode ini mengusulkan penggunaan Analisis Komponen Dasar (PCA), yang memanfaatkan informasi kepemilikan aset seperti kondisi rumah, fasilitas WC/kamar mandi, dan lain-lain sebagai alternatif pencatatan pengeluaran konsumsi secara rinci. Karena hasil pengestimasian tingkat kesejahteraan dengan menggunakan aset tidak jauh berbeda dengan menggunakan pengeluaran konsumsi rinci, namun lebih mudah mengumpulkannya, Filmer dan Pritchett berargumentasi bahwa metode mereka lebih baik, khususnya untuk menghitung kesejahteraan rumah tangga jangka panjang.

Secara keseluruhan, terdapat empat estimasi PCA: satu untuk masing-masing desa. Keuntungan utama penggunaan PCA adalah bahwa metode ini memperkenankan penentuan indikator kemiskinan yang berkarakteristik lokal. Ini merupakan perbedaan penting dari metode CBMS dibandingkan dengan berbagai metodologi yang diterapkan oleh sistem pemantauan kemiskinan lain di Indonesia.

Analisisnya bersumbu pada tingkat keluarga dan variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel V.1. Hanya variabel-variabel yang dapat dijawab dengan ya/tidak yang dipakai agar analisis dan pemahaman hasil-hasilnya lebih sederhana. Hasil-hasil PCA didiskusikan secara terpisah untuk setiap desa pada Bagian VIII hingga XI.

Tabel V.1 Indikator Kesejahteraan Keluarga CBMS

Kelompok variabel	Variabel
<i>Kepemilikan aset</i>	Memiliki kulkas
	Memiliki telepon
	Memiliki kipas angin
	Memiliki penyejuk udara
	Memiliki antena parabola
	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>
	Memiliki TV berwarna
	Memiliki TV hitam putih
	Memiliki radio
	Memiliki alat perekam (<i>tape recorder</i>)
	Memiliki komputer
	Memiliki mesin jahit
	Memiliki telepon selular/genggam
	Memiliki alat elektronik lain
	Memiliki kendaraan bermotor roda dua
	Memiliki mobil
	Memiliki sepeda
	Memiliki tanah
	Memiliki rumah

Kelompok variabel	Variabel
<i>Kepemilikan binatang ternak</i>	Memiliki ayam
	Memiliki kambing
	Memiliki sapi
<i>Status perkawinan</i>	Kepala keluarga berstatus menikah
<i>Jenis kelamin kepala keluarga</i>	Kepala keluarga perempuan
<i>Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA
	Pendidikan kepala keluarga: diploma
	Pendidikan kepala keluarga: universitas
	Pendidikan pasangan: SD
	Pendidikan pasangan: SLTP
	Pendidikan pasangan: SLTA
	Pendidikan pasangan: diploma
	Pendidikan pasangan: universitas
<i>Anggota keluarga yang bekerja</i>	Kepala keluarga bekerja
	Pasangan bekerja
	Sedikitnya satu anak usia sekolah yang bekerja
<i>Sektor pekerjaan</i>	Keluarga bekerja dalam sektor pertanian
	Keluarga bekerja dalam sektor industri
	Keluarga bekerja dalam sektor perdagangan
	Keluarga bekerja dalam sektor jasa
	Keluarga menerima transfer (menganggur)
<i>Akses terhadap lembaga keuangan</i>	Memiliki tabungan
	Pernah menerima pinjaman dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir
	Pernah menggadaikan aset selama tiga tahun terakhir
	Harus menjual aset untuk membayar utang
<i>Konsumsi makanan dan indikator kesehatan</i>	Makan dua kali sehari
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu
	Mengupayakan layanan medis ketika sakit
	Mengonsumsi air dari sumber yang aman
	Memanfaatkan WC pribadi
	Ukuran luas rumah keluarga per kapita lebih dari 8 meter per segi.
	Tinggal di rumah berlantai tanah
	Pernah mengalami kematian bayi selama 3 tahun terakhir
<i>Indikator kesejahteraan lainnya</i>	Menggunakan sumber energi listrik
	Sedikitnya satu anak usia sekolah pernah putus sekolah
	Tingkat ketergantungan yang tinggi (lebih dari setengah anggota keluarga berusia di bawah usia 15 tahun)
	Kebanyakan anggota keluarga membeli pakaian baru sedikitnya sekali setahun
<i>Partisipasi politik dan akses kepada informasi</i>	Pernah menjadi korban kejahatan pada satu tahun terakhir
	Sedikitnya satu anggota keluarga pernah ikut memilih dalam pemilu terakhir
	Menonton TV atau membaca koran sedikitnya sekali seminggu

Catatan: Variabel boneka “tidak tamat SD” pada tingkat pendidikan dan “sektor lain” pada sektor pekerjaan tidak dimasukkan.

VI. TINJAUAN UMUM DESA-DESA CBMC

A. DESA CIBULAKAN

Cibulakan adalah satu dari 16 desa di Kecamatan Cugenang di Kabupaten Cianjur. Desa ini dibagi atas tiga blok utama, yang secara keseluruhannya terdiri atas 6 RW dan 22 RT. Kelima RW pertama terletak di sisi jalan desa, sementara RW 6 terletak kira-kira 2 km dari jalan desa dan dikelilingi persawahan.

Desa ini terletak kira-kira 6 km dari ibu kota Cianjur atau 4 km dari ibu kota Cugenang. Meski tidak berada dekat dengan jalan-jalan antarkota, desa ini dapat diakses dari dua arah jalan yakni: Cianjur-Jakarta dan Cianjur-Sukabumi. Kedua jalan tersebut dapat dicapai dalam 20 menit waktu perjalanan dengan mobil dari desa tersebut. Sementara itu, jalan dari jalan antarkota ke desa tersebut relatif terpelihara dengan baik, meskipun sangat sempit. Jalan ini telah memungkinkan transportasi umum seperti minibus untuk melayani desa. Hal ini jelas membantu warga masyarakat untuk mencapai kota Cianjur.

Selain minibus, transportasi umum lain yang ada di desa tersebut adalah jasa ojek yang melayani transportasi jarak pendek. Jasa ojek ini secara khusus dimanfaatkan oleh warga masyarakat RW 6 yang tidak dilayani oleh minibus. Selain itu, jalan yang mengarah ke RW tersebut hanya dapat dilalui oleh ojek selama musim hujan.

Menurut data terakhir dari BPS, pada 2003 luas wilayah Cibulakan adalah 200 hektare. Wilayah terluas (138,3 hektare) dipakai untuk kegiatan persawahan sepanjang tahun. Untuk wilayah tempat tinggal luasnya mencapai 34,5 hektare. Sisanya dimanfaatkan untuk kolam ikan dan fasilitas umum.

Kebanyakan warga masyarakat bekerja sebagai petani, beberapa di antaranya memiliki sawah namun tidak mengelolanya, beberapanya mengelola sawah miliknya sendiri, beberapa lagi menjadi buruh tani karena tidak memiliki sawah sendiri. Kebanyakan petani menanam padi, sementara hanya segelintir yang menanam sayur-sayuran atau mengusahakan budidaya ikan. Selain pertanian, pekerjaan lainnya adalah berdagang, bekerja di perusahaan swasta, menjadi PNS, dan menjadi supir minibus atau menjadi tukang ojek. Cukup banyak warga masyarakat yang bekerja sebagai TKI, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Keluarga-keluarga TKI umumnya relatif lebih makmur dibanding dengan keluarga-keluarga lainnya.

Secara umum, masyarakat masih menggunakan sumur dan mata air sebagai sumber utama air minum meski PDAM sudah menyediakan layanan di daerah ini, yang berarti kebanyakan rumah telah memiliki akses pada air bersih. Mereka yang tidak memiliki air PDAM dapat mengambilnya dari sumber air PDAM yang tersedia secara gratis di mesjid setempat.

Untuk sumber penerangan, hampir setiap rumah memiliki akses penerangan listrik dari PLN, meskipun terdapat segelintir yang masih menggunakan lampu petromaks.

Banyak warga telah memiliki fasilitas kamar mandi dan WC secara terpisah. Kebanyakan rumah memiliki kamar mandi, meski sangat sederhana yang hanya terdiri atas bak air yang juga berfungsi sebagai kolam, dan juga memiliki WC pribadi. Hanya segelintir keluarga yang menggunakan WC umum dan bahkan lebih sedikit yang masih menggunakan sungai untuk kegiatan mandi dan membuang hajat.

Fasilitas pendidikan di desa tersebut terbatas. Terdapat empat sekolah dasar negeri dan satu sekolah menengah pertama (SLTP) swasta. Meski demikian, sekolah lain juga relatif dekat. Terdapat SLTP negeri di sebuah kecamatan yang bertetangga dengan desa ini dan sekolah menengah atas (SLTA) serta perguruan tinggi di ibu kota Cianjur. Terlebih lagi, sekolah-sekolah yayasan Islam yang dikelola secara lokal seperti pesantren juga tersedia di desa tersebut.

Tidak terdapat fasilitas layanan umum kesehatan di desa ini. Satu-satunya yang pernah ada tidak digunakan lagi. Meski demikian, terdapat dua orang perawat yang telah membuka praktik pribadi di rumahnya dan demikian juga seorang bides, dan juga tersedia dukun beranak.

Fasilitas telekomunikasi umumnya banyak tersedia. Jaringan telepon permanen tersedia dari Telkom, meski jumlah pelanggan sangat kecil. Sementara, terdapat juga wartel yang tersedia bagi warga masyarakat. Sebaliknya, telepon selular menjadi kian marak. Ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya ketersediaan *handset* murah, sinyal telepon yang dapat diterima dengan baik, dan biaya komunikasi (*airtime*) yang sangat murah.

Bentuk infrastruktur lain yang lebih besar seperti pasar, kantor pos, kantor polisi dan bank belum tersedia. Jika ingin mendapatkan layanan tersebut, warga harus pergi ke ibu kota Cianjur, meskipun bank juga tersedia di ibu kota kecamatan. Untuk tujuan memperoleh kredit, warga masyarakat biasanya mendatangi bank ini, juga pegadaian dan unit keuangan mikro dari Program Pengembangan Kecamatan.¹²

B. DESA PARAKANTUGU

Sebelum tahun 2005, Parakantugu adalah bagian dari Kecamatan Kadupandak. Pada Januari 2005, ada pemekaran kecamatan menjadi dua kecamatan yakni: Kecamatan Kadupandak dan Kecamatan Cijati. Desa Parakantugu masuk menjadi bagian dari kecamatan baru, yakni Kecamatan Cijati. Desa Parakantugu terletak di sepanjang Sungai Cibuni yang kerap terjadi banjir selama musim penghujan.

Desa ini terletak kira-kira 90 km dari ibu kota Cianjur dan 5 km dari kota Kecamatan Cijati. Ironisnya, Desa Parakantugu hanya berjarak 2 km dari kota Kecamatan Kadupandak. Menjadi pertanyaan mengapa desa ini kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Cijati. Untuk menuju desa ini, waktu tempuh dengan mobil dari Kota Cianjur kurang lebih 4 hingga 5 jam. Ada tiga rute yang dapat dilalui.:

¹² Program Pengembangan Kecamatan adalah proyek pemerintah yang didanai Bank Dunia.

- Cianjur – Sukanagara – Kadupandak – Parakantugu. Rute ini yang paling sulit karena buruknya kondisi jalan sepanjang 15 km menjelang Kadupandak. Namun, rute ini dilalui oleh transpor umum.
- Cianjur – Sukanagara – Tanggeung – Cigadog – Parakantugu. Rute ini juga dalam kondisi buruk karena sepanjang 20 km hanya terdapat pengerasan. Rute ini juga dilalui transpor umum.
- Cianjur – Sukanagara – Wedung – Parakantugu. Wedung – Parakantugu hanya dilalui ojek. Transportasi umum lainnya tidak diizinkan masuk menyusul pertikaian antara tukang ojek dan sopir minibus beberapa tahun yang lalu. Rute ini paling baik dimanfaatkan jika membawa kendaraan pribadi, meski jalannya sangat sempit.

Warga masyarakat Parakantugu memiliki akses yang mudah pada transportasi umum dalam desa mereka, baik dengan minibus maupun jasa ojek, meski tidak tersedia sepanjang hari. Minibus beroperasi pada pukul 06.00 hingga 16.00, sementara jasa ojek dipakai terutama untuk perjalanan di dalam desa.

Kondisi jalan utama di Parakantugu tidak terawat dengan baik. Sebagian jalannya berbatu-batu, bertanah dan sebagian kecilnya beraspal. Akan tetapi, lorong-lorong kecil menuju rumah warga telah diaspalkan dengan dana Proyek Pengembangan Kecamatan. Sayangnya tidak ada dana pemeliharaan dan hanya menunggu waktu saja sampai jalan ini kembali rusak.

Menurut data BPS 2003, Parakantugu memiliki luas 351 hektare. Enam puluh persen dari wilayahnya adalah lahan padi yang dapat dipanen sekali setahun karena musim kering yang panjang. Untuk pemukiman penduduk, luas lahan yang terpakai kira-kira 17,4% dari total lahan yang ada. Kebanyakan warga masyarakat lahir di desa tersebut dan hanya ada sedikit pendatang.

Kebanyakan warga bekerja sebagai petani. Sebagian kecil bekerja sebagai pedagang, PNS dan karyawan. Ada beberapa yang pensiunan. Kaum muda bekerja sebagai buruh bangunan, buruh angkut dan tukang ojek. Selain itu, banyak perempuan di desa ini bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia. Merantau dan bekerja di luar negeri merupakan hal yang biasa bagi masyarakat desa karena kebanyakan warga yang lebih tua telah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri.

Tidak ada fasilitas kesehatan di desa ini, meski demikian desa ini memiliki seorang bides. Juga terdapat tiga dukun beranak yang banyak diminta bantuannya. Puskesmas terdekat terletak di Kadupandak, sekitar 15 menit perjalanan dengan sepeda motor dan jika ingin mendapat layanan kesehatan yang lebih canggih warga terpaksa harus mendatangi Kota Cianjur.

Dalam hal fasilitas pendidikan, terdapat empat SDN dan satu SLTP swasta. Untuk ke SLTA terdekat perlu jarak tempuh satu jam perjalanan dengan mobil. Mungkin ini menjadi alasan utama mengapa kebanyakan anak usia sekolah menjadi putus sekolah setelah menyelesaikan SLTP.

C. DESA KEDONDONG

Desa Kedondong terletak 10 km dari Ibu kota Kabupaten Demak, terdiri dari tiga RW dengan total 20 RT. Desa ini dikelompokkan dalam blok, dengan masing-masing bloknya terdapat satu RT atau terdiri atas 60 rumah.

Menyangkut fasilitas pendidikan, terdapat empat SD namun tidak terdapat SLTP atau SLTA. SLTP terdekat berjarak 3 km dari desa ini dan SLTA terdekat berjarak 5 km. Sementara itu, fasilitas pendidikan tinggi terdekat berjarak 8 km, dekat pusat kota. Lebih lagi, tidak tersedia fasilitas pendidikan nonformal. Transportasi untuk menjangkau fasilitas tersebut di atas tidak sulit karena terdapat layanan transpor secara reguler dari dan menuju desa.

Meski tidak terdapat fasilitas kesehatan yang permanen di desa ini, baik layanan swasta maupun umum, terdapat tiga bides dan dua perawat yang sering berkunjung ke desa sedikitnya sekali seminggu. Terlebih lagi, obat-obatan tanpa resep dokter pun tersedia di kios-kios kecil di seluruh desa.

Akses keluar dan masuk desa cukup memadai. Jenis jalan terpanjang dalam bahasa setempat disebut *makadam* yang berarti bahwa pengerasan jalan telah dilakukan dan siap untuk dilapisi dengan aspal. Singkatnya, ini merupakan jenis jalan yang berada satu tingkat di bawah jalan beraspal. Dengan demikian, jalan ini dapat dilalui setiap tahun. Transportasi umum seperti minibus dan ojek tersedia setiap hari, sedikitnya selama 8 jam. Dalam hal sanitasi, kebanyakan warga masyarakatnya memanfaatkan air sungai di sebelah barat desa untuk mandi. Hal ini sungguh mengejutkan, mengingat jarak yang dekat antara desa ini dengan ibu kota kabupaten dan ketersediaan sistem air PAM di setiap rumah. Seorang warga menjelaskan kepada peneliti SMERU bahwa hanya orang yang sangat kaya yang memiliki kamar mandi, sementara kebanyakan keluarga, termasuk mereka yang mampu membangun kamar mandi, tetap menggunakan sungai karena mereka dapat berinteraksi secara sosial dengan tetangga lain saat mandi. Sebaliknya, hampir semua anggota masyarakatnya mengkonsumsi air minum dari PAM.

Untuk sumber energi, kebanyakan masyarakat desa menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi untuk memasak, disusul minyak tanah dan kompor gas. Sementara itu, setiap rumah telah terhubung aliran listrik dari PLN, meski ada beberapa rumah yang tidak secara langsung mendapat aliran listrik dari PLN, tetapi mereka mendapatkannya melalui rumah lain.

Meskipun hanya sekitar 1% warga penduduk telah memiliki fasilitas telepon dan lebih sedikit lagi yang memiliki telepon selular, di desa ini sudah terdapat beberapa wartel. Namun, di desa ini tidak terdapat kantor pos, dan kantor pos terdekat berjarak 6 km dari desa.

Bank resmi yang tersedia di desa ini adalah bank milik pemerintah yakni BKK,⁹ bank milik pemerintah provinsi yang bergerak dalam bidang pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan usaha mikro, dan BKD,¹⁰ versi yang lebih kecil dari BKK yang merupakan milik

⁹ Lihat www.gdrc.org/icm/bkk.html untuk penjelasan singkat tentang BKK.

¹⁰ Lihat www.gdrc.org/icm/country/id-mfi/idmfi-bkd.pdf untuk penjelasan singkat tentang BKD.

pemerintah desa. Tidak terdapat lembaga keuangan formal lainnya di desa ini, meskipun ada bank keliling dan tukang riba/kredit yang secara berkala mengunjungi desa tersebut.¹¹

D. DESA JUNGPASIR

Desa Jungpasir adalah satu di antara 20 desa di Kecamatan Wedung, di Kabupaten Demak. Desa ini dibagi dalam lima RW dengan total 11 RT dan terletak di perbatasan antara Demak dan Jepara, sebuah kabupaten di bagian timur Demak. Desa ini berjarak 25 km dari kota kabupaten dan sekitar 15 km dari kota kecamatan.

Desa Jungpasir berada jauh dari jalan negara (jalan yang dibangun pemerintah pusat) yang menghubungkan Demak dan Jepara. Di desa tersebut, jalan utama terbuat dari aspal, meskipun telah mengalami banyak kerusakan akibat minimnya pemeliharaan. Akan tetapi, transportasi umum beberapa kali melewati desa tersebut setiap hari untuk menyediakan jasa angkutan ke Demak dan Jepara.

Terdapat dua jalan utama yang menuju ke Desa Jungpasir. Jalan yang paling cepat ditempuh adalah melalui jalan negara menuju Jepara dan menyusuri jalan di sisi-sisi sungai yang membelah Jepara dan Demak. Kondisi jalan di sisi Jepara terawat dengan baik, sangat berbeda dengan kondisi jalan di Demak. Ini membuat jarak tempuh dari ibu kota Demak ke Jungpasir hanya memerlukan satu jam. Alternatif jalan lainnya adalah melewati ibu kota Kecamatan Wedung. Namun, waktu perjalanan yang ditempuh menjadi lebih panjang, yakni lebih dari dua jam karena parahnya kondisi jalan.

Menurut database Podes BPS, pada 2003 Desa Jungpasir memiliki luas 353,1 hektare yang kebanyakannya adalah sawah (306, 5 hektare). Luas wilayah pemukiman hanya mencakupi 30 hektare dan dikelompokkan di area sepanjang jalan utama desa. Sebagian luasnya diperuntukan bagi fasilitas umum, fasilitas keagamaan, tanah kuburan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah ditunjukkan oleh proporsi pemanfaatan lahan, kebanyakan warga masyarakat desa ini adalah petani, baik yang memiliki sawah, yang bekerja di sawah, atau kedua-duanya. Jenis pekerjaan lain adalah berjualan makanan dan buah. Kebanyakan warga masyarakat yang bekerja di sektor ini melakukan dagangnya di Demak, Jepara dan bahkan Jakarta.

Mengenai akses pada sanitasi, 70% warganya mendapatkan air minum dari sumur, baik yang terlindung maupun yang tidak, sementara sisanya menggunakan air PAM. Untuk sumber penerangan, setiap rumah mendapat pasokan listrik dari PLN. Kebanyakan warga juga telah memiliki WC pribadi. Meski demikian, masih ada beberapa warga yang memanfaatkan air sungai atau WC milik tetangganya.

Untuk desa yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten, fasilitas pendidikan umumnya telah tersedia. Ada tiga sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama (SLTP) swasta dan satu sekolah menengah atas (SLTA) swasta. SLTP negeri terdekat hanya berjarak lima menit dari desa, sementara SLTA dan fasilitas pendidikan tinggi hanya tersedia di kota kabupaten.

¹¹ Bank keliling dan para tukang riba adalah pemberi pinjaman tidak resmi yang mengenakan tingkat bunga yang sangat tinggi. Lagganan mereka umumnya petani yang membutuhkan uang muka pada awal musim tanam.

Satu-satunya fasilitas kesehatan yang tersedia adalah poliklinik umum yang dilayani seorang bidan dan seorang perawat. Di samping itu, ada juga dua dukun beranak. Untuk pelayanan dokter umum atau dokter spesialis, warga masyarakat terpaksa harus pergi ke Demak.

Akan halnya fasilitas telekomunikasi, segelintir kecil warga masyarakat memiliki sambungan telepon sendiri. Meski demikian, terdapat enam wartel di desa tersebut. Fasilitas umum yang lain seperti pasar, kantor pos, bank belum tersedia di desa tersebut. Pasar yang terdekat terdapat di desa tetangga yang secara teknis sudah masuk dalam wilayah administrasi Jepara, sementara kantor pos terdekat berada di kota kecamatan terdekat dan bank hanya terdapat di kota kabupaten. Meski demikian, akses pada lembaga keuangan masih relatif mudah karena terdapat dua koperasi di Jungpasir yang menyediakan layanan yang sama seperti yang disediakan bank.

VII. PROFIL KUANTITATIF DESA CBMS

Bagian ini menjelaskan profil desa CBMS yang terbagi atas enam katagori.

A. PENDUDUK

Tabel VII.1 memberikan karakteristik populasi keempat desa CBMS.

Tabel VII.1 Karakteristik Populasi Desa dalam Lokasi Proyek CBMS

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Jumlah penduduk	5313	3958	4426	5051
Jumlah keluarga	1428	1295	1386	1272
Rata-rata jumlah keluarga	4,54	3,76	3,70	4,73
Rasio jenis kelamin (Perempuan:Laki-laki)	47:53	49:51	49:51	50:50
Proporsi kepala keluarga perempuan (%)	14,34	12,97	12,12	15,09

Terdapat 1428 keluarga di Cibulakan, dengan rata-rata jumlah anggota dalam keluarga 4,5 orang. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ideal rata-rata anggota keluarga menurut BKKBN, yakni empat orang. Sementara itu, 53% warga masyarakat adalah perempuan dan 14,3% keluarga dikepalai oleh perempuan, yang umumnya telah menjadi janda atau cerai.

Terdapat 1295 keluarga di Parakantugu. Rata-rata jumlah anggota keluarga sudah ideal, yakni 3,8 per keluarga. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan di desa ini dan 13% keluarga dikepalai oleh perempuan. Sebagaimana di desa-desa lainnya, keluarga yang dikepalai perempuan umumnya adalah keluarga dengan orang tua tunggal.

Kedondong juga memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga yang kecil, yakni 3,7 orang yang berarti bahwa sasaran Program KB Dua Anak Cukup untuk setiap keluarga telah mencapai target. Sementara itu, 12,1% keluarga dikepalai oleh perempuan dan 60% darinya adalah keluarga dengan orang tua tunggal, terutama terdiri dari keluarga yang dikepalai oleh janda tua atau janda mati/cerai dengan satu atau dua anak.

Di Desa Jungpasir, terdapat 1272 keluarga. Rata-rata jumlah anggota lebih besar, yakni 4,7 orang per keluarga. Jumlah laki-laki dan perempuan di desa ini berimbang. Sementara hanya 15% keluarga yang dikepalai oleh perempuan yang kebanyakan adalah janda mati atau cerai.

B. PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN

Tabel VII.2 menyediakan karakteristik pekerjaan dan tingkat penyerapan tenaga kerja di empat desa tersebut.

Tabel VII.2 Karakteristik Desa Proyek CBMS Berkaitan dengan Pekerjaan (%)

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Proporsi kepala keluarga yang bekerja	93,71	94,83	96,47	97,41
Proporsi penduduk usia kerja (15+) yang bekerja				
Laki-laki	77,94	82,14	88,79	81,93
Perempuan	27,78	30,40	63,70	59,70
Total	54,04	56,38	76,37	70,67
Jumlah anggota keluarga yang bekerja				
0	4,98	4,06	2,92	1,81
1	64,59	65,05	34,99	28,77
2	22,37	26,11	46,53	45,52
3 atau lebih	8,06	4,78	15,56	23,90
Sektor kerja				
Menerima transfer	7,91	7,10	3,67	3,07
Pertanian	38,94	48,03	58,21	39,07
Industri	3,85	3,17	9,37	3,38
Perdagangan	15,20	16,76	9,29	41,12
Jasa	34,03	24,86	18,95	13,21

Sebanyak 93,7% kepala keluarga di Cibulakan berstatus bekerja. Dari jumlah keluarga yang kepala keluarganya tidak bekerja, umumnya terdapat anggota keluarga lain yang juga bekerja. Akan tetapi, terdapat 5% keluarga yang tidak memiliki anggota yang bekerja. Biasanya mereka adalah keluarga yang hanya terdiri dari orang tua tunggal yang menerima kiriman uang dari anak-anaknya yang telah berkeluarga sendiri.

Tingkat angka pekerja di Cibulakan sangat rendah, khususnya di kalangan perempuan. Secara keseluruhan, hanya separo lebih dari kaum dewasa yang bekerja. Tingkat angka pekerja di kalangan perempuan dewasa sangat rendah, yakni 27,8%. Seperti telah disebutkan pada Bagian VI, jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti adalah sektor pertanian dan kemudian diikuti oleh sektor jasa.

Di Parakantugu, 94,8% kepala keluarga bekerja dan umumnya pekerjaan itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa 65,1% keluarga hanya bergantung pada satu pencari nafkah. Sementara itu, 26,1% memiliki dua sumber pendapatan yang umumnya adalah kepala keluarga dan pasangannya atau anaknya.

Seperti telah disebutkan di atas pada Bagian VI, hampir separo penduduk bekerja di sektor pertanian. Sekitar 24,9% bekerja di sektor jasa, terutama sopir, pekerja bangunan, dan guru. Lainnya bekerja pada industri kecil atau membuka toko-toko kecil. Ada juga yang menerima kiriman uang dari kerabat.

Tingkat angka pekerja di antara penduduk usia kerja di Parakantugu sangat rendah, yakni hanya 56,4% yang bekerja. Dan perempuan yang bekerja di antara penduduk perempuan usia kerja bahkan lebih rendah, yakni 30,4% sementara di kalangan laki-laki mencapai 82,1%. Hal ini cocok dengan pengamatan bahwa peran laki-laki sebagai pencari nafkah sungguh telah berakar di tengah-tengah masyarakat, sementara perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga.

Di Kedondong, kepala keluarga yang bekerja mencapai 96,5% yang berarti bahwa hampir setiap keluarga di desa ini sedikitnya memiliki satu anggota keluarga yang bekerja. Hal ini juga ditunjukkan oleh jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja, yakni hanya 2,9% keluarga yang memiliki anggota yang tidak bekerja. Sementara itu, hampir separo memiliki dua anggota yang bekerja.

Akan tetapi yang menarik dicatat adalah bahwa keseluruhan tingkat angka pekerja secara kasar dari angka usia kerja warga masyarakat hanya 76,4%, dengan laki-laki dan perempuan masing-masing 88,8% dan 63,7%. Sementara itu, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, hal yang lazim ditemukan di perdesaan di Jawa. Sektor jasa yang banyak diminati masyarakat adalah sopir bus, tukang ojek dan buruh/pekerja bangunan. Akhirnya, mereka yang menerima kiriman dari luar terdiri atas para pensiunan, atau pasangan manula yang secara berkala menerima kiriman uang dari anak-anak mereka yang telah berkeluarga.

Dari Tabel VII.2 dapat dilihat bahwa hanya 2,6% kepala keluarga di Jungpasir yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa hanya 1,8% keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga yang bekerja. Keluarga tersebut biasanya keluarga orang tua tunggal yang menerima kiriman dari keluarga lain.

Tabel yang sama memperlihatkan bahwa tingkat angka pekerja lebih tinggi pada laki-laki dibanding pada perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan domestik di rumah untuk mengurus keluarga. Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang bekerja, hampir separo keluarga di Jungpasir (45,5%) memiliki dua anggota yang bekerja, sementara 23,9% dari keluarga memiliki tiga orang atau lebih anggota keluarga yang bekerja. Sementara itu, kebanyakan warga masyarakat berada di sektor perdagangan (41,1%) dan sektor pertanian (39,07%) dan hanya 13,2% di sektor jasa.

Tampak terdapat kondisi-kondisi khusus di kabupaten yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Di Cianjur, tingkat penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan Demak. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kebanyakan keluarga di dua desa di Kabupaten Cianjur rata-rata hanya memiliki satu anggota keluarga yang bekerja. Sebaliknya, sekitar separo keluarga di Demak memiliki dua orang anggota keluarga yang bekerja.

Sementara itu, pada Tabel VII.3 menyediakan tingkat melek aksara dan tingkat pendidikan warga usia kerja di desa-desa ini. Di Cibulakan, hampir setiap orang dewasa melek aksara, dengan tingkat lebih tinggi pada laki-laki (97,9%) dibandingkan perempuan (94,2%). Dalam hal tingkat pendidikan, kaum dewasa di Cibulakan relatif memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Mayoritas, 70,3%, hanya tamat SD, dengan 10,9% bahkan tidak tamat SD. Hanya 2,2% yang mengenyam pendidikan tinggi.

Tabel VII.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja yang Meninggalkan Bangku Sekolah di Lokasi Proyek CBMS (%)

	Laki-laki	Perempuan	Total
Cibulakan			
Tingkat keberaksaraan (melek huruf)	97,91	94,17	96,13
Tingkat pendidikan			
Tidak tamat SD	9,44	12,39	10,85
SD	68,75	71,92	70,25
SLTP	8,26	6,47	7,43
SLTA	9,78	6,96	8,43
Diploma/universitas	2,98	1,40	2,22
Parakantugu			
Tingkat keberaksaraan (melek huruf)	99,19	98,28	98,71
Tingkat pendidikan			
Tidak tamat SD	1,97	2,70	2,33
SD	68,36	73,22	70,78
SLTP	19,73	17,19	18,45
SLTA	7,68	5,18	6,42
Diploma/universitas	1,76	1,28	1,52
Kedondong			
Tingkat melek huruf	90,78	80,80	85,79
Tingkat pendidikan			
Tidak tamat SD	18,93	27,27	23,07
SD	62,13	58,86	60,58
SLTP	12,29	10,51	11,35
SLTA	4,67	2,29	3,48
Diploma/universitas	1,97	1,07	1,52
Jungpasir			
Tingkat keberaksaraan (melek huruf)	91,27	79,85	85,48
Tingkat pendidikan			
Tidak tamat SD	21,77	32,71	27,31
SD	31,13	30,82	30,97
SLTP	27,70	23,04	25,34
SLTA	16,47	11,19	13,79
Diploma/universitas	1,74	1,34	1,54

Kebanyakan orang dewasa di Parakantugu telah melek aksara dan tingkat keberaksaraan baik di kalangan perempuan maupun laki-laki sangat tinggi. Mereka yang buta huruf dapat dengan mudah diidentifikasi dari persentase orang dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya (SD), meskipun ada juga yang dapat membaca meskipun tidak tamat SD.

Tingkat pendidikan di kalangan penduduk usia kerja sangat rendah. Sebanyak 70,8% penduduk hanya mengenyam pendidikan selama enam tahun (tamat SD), dengan persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak diperoleh laki-laki dibanding perempuan. Secara umum, tampaknya laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Di Kedondong, tingkat melek aksara pada laki-laki mencapai 90,8% sementara pada perempuan 10 titik persentase lebih rendah, yakni 80,8%. Secara keseluruhan, 85,8% orang dewasa dapat membaca dan menulis. Sebanyak 83,7% penduduk usia kerja telah mengenyam pendidikan dasar enam tahun atau kurang dari enam tahun. Hanya 1,5% telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini konsisten dengan sektor lapangan kerja utama di desa itu, di mana 58% keluarga bermata pencaharian di sektor pertanian.

Terakhir, di Jungpasir, tingkat pendidikan penduduk usia kerja juga relatif rendah, meskipun sifatnya lebih menyebar dibanding desa-desa lain. Hanya 13,8% dari penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA dan hanya 1,5% yang berpendidikan tinggi. Bahkan terdapat 27,3% tidak menyelesaikan pendidikan SD. Sekitar 15% di antaranya belum melek aksara dan kebanyakan adalah kaum perempuan. Mereka yang belum melek aksara umumnya adalah orang dewasa yang tidak pernah lagi membaca selama beberapa waktu yang lama. Meskipun dahulunya ketika masih muda mereka dapat membaca, saat ini mereka tidak lagi mampu membaca.

Setelah mengamati tingkat pendidikan penduduk usia kerja, Tabel VII.4 memperlihatkan angka partisipasi murni dari setiap tingkat pendidikan. Angka partisipasi murni SD di dua desa di Cianjur relatif lebih rendah dibanding desa-desa di Demak. Di Cibulakan, angka partisipasi murni SD hanya 78,7% sementara angka partisipasi tingkat SLTP berkisar hingga 42,7% dan di tingkat SLTA hanya 20,7%. Angka partisipasi murid perempuan SD lebih tinggi dibanding murid laki-laki, tetapi angka partisipasi perempuan di tingkat SLTP dan SLTA lebih rendah dibanding angka partisipasi laki-laki.

Hasil observasi menunjukkan bahwa angka partisipasi yang rendah di Cibulakan terjadi karena biaya pendidikan relatif masih mahal bagi kebanyakan warga masyarakat dan para orang tua tidak menyadari pentingnya pendidikan formal. Jarak tampaknya bukan menjadi hambatan serius karena semua fasilitas pendidikan dari SD hingga pendidikan tinggi dapat dijangkau dengan waktu paling lama 30 menit dari desa ini.

Tingkat partisipasi murni dari siswa di SD dan SLTP di Parakantugu adalah 77% dan 80,1% secara berturut-turut, sementara angka partisipasi murni dari siswa di tingkat SLTA hanya 18,9% terutama karena tidak tersedianya SLTA yang terdekat. Sementara itu, angka partisipasi murni dari siswa perempuan lebih rendah pada ketiga tingkat pendidikan.

Tabel VII.4 Angka Partisipasi Murni dari Siswa di Lokasi Proyek CBMS (%)

	Laki-laki	Perempuan	Total
Cibulakan			
SD	76,82	80,64	78,70
SLTP	44,13	41,10	42,68
SLTA	22,60	18,67	20,73
Parakantugu			
SD	77,30	76,92	76,95
SLTP	82,00	80,00	80,10
SLTA	20,18	17,98	18,91
Kedondong			
SD	90,60	93,36	91,49
SLTP	66,67	62,50	64,94
SLTA	30,48	23,77	26,64
Jungpasir			
SD	96,12	94,29	95,23
SLTP	96,48	95,24	95,85
SLTA	68,59	60,21	63,98

Angka partisipasi murni dari siswa SD di Kedondong relatif tinggi, 91,5% meskipun sedikit lebih rendah dari angka partisipasi murni nasional sebesar 93% (UNDP). Sementara itu, angka partisipasi murni di tingkat SLTP dan SLTA adalah 64,9% dan 26,6% secara berturut-turut yang menunjukkan bahwa banyak siswa yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan tingkat tertentu, apakah di tingkat SD ataupun SLTP, daripada putus sekolah di tingkat tertentu. Rendahnya angka melanjutkan sekolah ini mungkin juga disebabkan oleh jarak. SLTP terdekat berada 3 km dari desa tersebut sementara SLTA terdekat bahkan lebih jauh lagi. Mencermati angka partisipasi murni antara siswa perempuan dan siswa laki-laki, ditemukan bahwa tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi di tingkat SD dan partisipasi siswa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di Desa Jungpasir, angka partisipasi murni di SD dan SLTP sangat tinggi, yakni 95,2% dan 95,9% secara berturut-turut, sementara di tingkat SLTA hanya 64%. Angka putus sekolah setelah tamat SLTP disebabkan oleh antara lain masalah finansial, namun juga ada kecenderungan warga masyarakat untuk memilih SLTA negeri. Untuk tingkat SLTP hal ini tidak masalah karena terdapat SLTP negeri di desa ini, namun menjadi persoalan untuk tingkat SLTA karena SLTA negeri hanya ada di pusat kota Demak. Secara keseluruhan, angka partisipasi murni di antara siswa perempuan dan laki-laki hampir sama, meskipun angka partisipasi siswa laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan, khususnya di tingkat SLTA.

Karena pendidikan atau minimnya pendidikan bisa terkait dengan pekerja anak, Tabel VII.5 merinci kegiatan anak usia sekolah di empat desa ke dalam empat kombinasi belajar dan kerja.

Tabel VII.5 Sekolah dan Kerja bagi Anak di Lokasi Proyek CBMS(%)

	Putus sekolah	Bekerja	Bekerja sambil sekolah	Sekolah dan tidak bekerja	Putus sekolah dan bekerja	Putus sekolah dan tidak bekerja
Cibulakan						
Usia SD	21,30	0,80	0,23	78,47	0,57	20,73
Usia SLTP	57,32	7,01	1,22	41,46	5,79	51,52
Usia SLTA	79,27	23,78	0,00	20,73	23,78	55,49
Parakantugu						
Usia SD	23,05	0,40	0,00	76,95	0,40	22,65
Usia SLTP	19,90	3,14	1,57	78,53	1,57	18,33
Usia SLTA	81,09	14,43	0,00	18,90	14,43	66,67
Kedondong						
Usia SD	8,51	1,47	0,98	90,51	0,49	8,02
Usia SLTP	35,06	11,55	2,39	62,55	9,16	25,90
Usia SLTA	73,36	45,85	0,44	26,20	45,42	27,95
Jungpasisir						
Usia SD	4,77	0,31	0,00	95,23	0,31	4,46
Usia SLTP	4,15	2,42	0,00	95,85	2,41	1,73
Usia SLTA	36,02	19,88	2,02	61,96	17,87	18,16

Seperti terlihat pada Tabel VII.5, angka putus sekolah siswa di Cibulakan dimulai pada tingkat yang paling bawah. Sebanyak 21,3% dari anak usia enam hingga 12 tahun meninggalkan bangku sekolah. Angka putus sekolah ini terus meningkat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 57,3% dan bahkan 79,3% secara berturut-turut pada tingkat SLTP dan SLTA. Namun, tabel ini menunjukkan bahwa mereka yang putus sekolah belum tentu bekerja. Secara keseluruhan, hanya 0,8%, 7% dan 23,8% dari anak usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan benar-benar bekerja. Kolom ketiga memperlihatkan bahwa hampir tidak ada anak yang bersekolah sambil bekerja, sementara pada kolom terakhir diperlihatkan bahwa lebih dari separo anak usia 13 hingga 18 tahun tidak bekerja dan juga tidak sekolah.

Angka putus sekolah di Parakantugu mencerminkan tingkat partisipasi murni seperti dalam Tabel VII.4. Menariknya, kebanyakan mereka yang putus sekolah tidak bekerja dan hal ini memperlihatkan bahwa anak-anak yang putus sekolah tidak disebabkan terutama karena biaya sekolah yang tidak dapat dijangkau tapi karena faktor lain.

Di Kedondong, 1,5% anak usia sekolah dasar bekerja, sementara hampir separo anak usia sekolah menengah atas bekerja. Desa ini memiliki paling banyak anak usia sekolah yang bekerja dibanding dengan ketiga desa lainnya. Lebih lanjut, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya terdapat sejumlah kecil anak-anak yang masih tetap ke sekolah dan juga bekerja, jumlah tertinggi 2,4% terdapat di tingkat SLTP. Ini membuktikan bahwa bekerja dan bersekolah praktis menjadi dua kegiatan yang terpisah di desa Kedondong, meskipun angka anak usia sekolah yang bekerja tetap adalah yang

tertinggi dibanding dengan desa-desa lain. Terakhir, tabel juga memperlihatkan adanya proporsi yang sangat tinggi dari anak-anak yang selain tidak bersekolah juga tidak bekerja yang berjumlah sekitar seperempat dari anak usia 13-18 tahun dan 8% dari anak usia 6-12 tahun.

Sementara itu, anak-anak di Jungpasir bahkan telah meninggalkan bangku sekolah dasar dan keadaan ini juga meningkat pada tingkat SLTA. Meski proporsinya masih terbilang kecil, terdapat 0,3% dan 2,4% masing-masing untuk anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang telah putus sekolah dan telah bekerja. Sebaliknya, tidak ditemukan anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang masih duduk di bangku sekolah dan telah bekerja, sementara 2% dari mereka yang duduk di bangku SLTA yang bekerja sambil sekolah. Sementara itu, ada 17,9% anak usia SLTA yang telah putus sekolah dan telah bekerja. Ini berarti separo dari 36% anak usia SLTA yang putus sekolah telah bekerja.

C. KESEHATAN DAN POLA KONSUMSI MAKANAN

Tabel VII.6 menyajikan karakteristik desa yang terkait dengan kesehatan, termasuk tingkat penggunaan alat kontrasepsi, imunisasi, akses kepada layanan medis formal dan akses pada air bersih.

Tabel VII.6 Karakteristik Kesehatan dan Sanitasi di Lokasi Proyek CBMS (%)

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Tingkat penggunaan alat kontrasepsi	52,64	58,46	76,26	66,18
Tingkat imunisasi di kalangan bayi				
BCG	49,34	68,77	77,75	87,87
DPT	45,73	68,49	74,08	87,41
Polio	58,44	67,12	78,40	86,00
MMR	44,02	57,81	69,98	75,06
Hepatitis B	45,16	56,16	64,58	77,35
Imunisasi lengkap	32,64	53,42	58,32	67,51
Persentase bayi yang ditangani kelahirannya oleh dokter	32,83	76,71	76,03	85,81
Proporsi bayi yang menerima layanan prakelahiran	77,42	74,79	86,39	97,03
Proporsi bayi yang menerima layanan pascakelahiran	65,46	75,62	77,11	94,97
Proporsi keluarga yang memiliki rumah berlantai tanah	0,42	0,31	40,14	28,38
Proporsi keluarga yang mengkonsumsi air bersih	99,79	100	96,85	99,69
Proporsi keluarga yang mencari layanan medis formal	91,18	89,73	95,25	94,03

Tingkat penggunaan alat kontrasepsi di Cibulakan relatif rendah, yakni 52,6%. Kontrasepsi yang paling banyak dipakai ialah yang melalui suntikan, kemudian disusul oleh pil. Peneliti SMERU yakin bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi di desa ini adalah mahalnya harga alat kontrasepsi, kelangkaan alat-alatnya di tingkat lokal, dan budaya dari segelintir warga masyarakat yang cenderung percaya bahwa pembatasan jumlah anak dalam keluarga bertentangan dengan ajaran Islam.

Terlebih lagi, tingkat imunisasi juga rendah di Cibulakan. Hanya 32,6% bayi yang telah menerima imunisasi lengkap dan rasio dari tiap jenis imunisasi bervariasi antara 44% dan 58%. Kelahiran yang ditangani dokter atau bides juga rendah yakni 32,8%. Ini memperlihatkan kebanyakan kelahiran ditangani oleh dukun beranak, sementara dokter atau bides hanya diminta pertolongannya ketika sang ibu mendapatkan masalah serius. Hal ini dapat dimengerti karena dukun beranak biasanya tidak memungut biaya mahal. Meskipun demikian, mayoritas para ibu telah menerima layanan prakelahiran dan pascakelahiran.

Untuk kondisi-kondisi medis selain dari kehamilan atau proses kelahiran, penggunaan fasilitas canggih sangat tinggi. Sebanyak 91,2% keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan modern selama sakit. Terlebih lagi, hampir setiap keluarga, 99,8% mengkonsumsi air matang. Hanya 0,4% keluarga yang masih tinggal di rumah berlantai tanah. Menurut para warga, investasi awal yang dilakukan keluarga ketika mereka memiliki uang adalah membeli keramik.

Hanya 58,5% keluarga usia produktif di Parakantugu yang menggunakan kontrasepsi. Lebih lagi, imunisasi masih terlihat jarang, meski jauh lebih baik dibanding Cibulakan. Tingkat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, dan Polio kurang dari 70%, sementara jenis imunisasi lain kurang dari 60% tingkat prevalensinya. Secara total, separo lebih sedikit dari bayi telah menerima imunisasi lengkap. Selanjutnya, tiga perempuan bayi dilahirkan dengan bantuan dokter/bides dan hampir 75% ibu-ibu menerima layanan pra dan pascakelahiran.

Hampir 90% keluarga mengupayakan layanan medis modern selama sakit dan setiap keluarga di Parakantugu mengkonsumsi air matang. Di samping itu, hanya 0,3% keluarga masih tinggal di rumah berlantai tanah.

Di Kedondong, meski terdapat banyak warga yang masih memanfaatkan air di sungai terdekat untuk mandi, 96,8% keluarga mengkonsumsi air bersih dan 95% darinya selalu mengupayakan layanan medis formal selama sakit. Sementara itu, 76,3% pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini untuk sebagian dapat menjelaskan penyebab rendahnya rata-rata jumlah anggota sebuah keluarga di desa tersebut.

Tingkat imunisasi di antara para bayi masih relatif rendah, meskipun kebanyakan vaksin disediakan secara gratis oleh pemerintah. Sebanyak 58,3% bayi telah menerima imunisasi lengkap, sementara 20% bayi belum menerima vaksinasi polio. Sebanyak 76% kelahiran bayi dibantu oleh dokter atau bides, sementara sisanya ditangani oleh dukun beranak. Selain itu, 86% ibu menerima layanan prakelahiran dan sekitar 77% menerima layanan pascakelahiran. Fakta bahwa tidak adanya fasilitas layanan kesehatan permanen di desa dapat menjadi alasan terbaik untuk menjelaskan kondisi ini. Meskipun demikian, kondisi umum para warga masih lebih baik dibandingkan dengan desa-desa yang lebih terpencil karena relatif dekatnya jarak desa tersebut dengan kota kabupaten. Terakhir, hampir separo keluarga masih tinggal di rumah-rumah berlantai tanah.

Dari Tabel VII.6 dapat dilihat bahwa di desa Jungpasir hanya 66,2% pasangan usia produktif menggunakan alat kontrasepsi dan umumnya menggunakan suntikan.

Persentase bayi yang tidak menerima imunisasi lengkap masih sangat tinggi (32,5%), meskipun ini adalah yang terendah dibanding keempat desa lain. Jika diteliti dari setiap jenis imunisasi, sekitar 75% - 88% anak-anak telah diimunisasi.

Penggunaan layanan medis formal sangat tinggi di Jungpasir. Sebanyak 86% kelahiran ditangani oleh dokter atau bides. Hampir di setiap kehamilan, para ibu menerima layanan kesehatan prakelahiran dan pascakelahiran. Lebih lagi, 94% keluarga telah memanfaatkan fasilitas medis modern ketika sakit. Terakhir, 99% keluarga mengkonsumsi air matang, meskipun 28,4% masih tinggal di rumah-rumah berlantai tanah.

Untuk mencermati pola konsumsi keluarga di empat desa tersebut, Tabel VII.7 memberikan informasi mengenai jumlah makanan yang biasa dikonsumsi keluarga setiap hari dan konsumsi daging, ikan dan telur.

Tabel VII.7 Pola Konsumsi Makanan di Lokasi Proyek CBMS(%)

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Proporsi keluarga yang anggotanya makan dua kali sehari	97.90	98.53	97.98	98.66
Proporsi keluarga yang mengkonsumsi daging setiap minggu	50.42	95.14	56.03	46.38
Proporsi keluarga yang mengkonsumsi ikan setiap minggu	77.38	96.99	98.92	94.42
Proporsi keluarga yang mengkonsumsi telur setiap minggu.	85.71	97.99	83.54	91.90

Secara umum, pola konsumsi keluarga di keempat desa tersebut cukup baik. Hampir setiap keluarga makan dua kali sehari. Tingkat konsumsi daging secara teratur umumnya hanya terjadi di kalangan masyarakat Parakantugu, sementara tiga desa lain rata-rata berkisar antara 50%. Konsumsi telur relatif tinggi di keempat desa, sementara konsumsi ikan terendah ada di Cibulakan, yang terletak di pedalaman, dibandingkan dengan ketiga desa lain yang relatif dekat dengan sungai atau laut.

D. KARAKTERISTIK KEUANGAN

Karakteristik keuangan dapat diamati pada empat aspek seperti terlihat dalam Tabel VII.8.

Seperti telah diuraikan pada Bagian VI.C, di Desa Cibulakan tidak terdapat lembaga kredit/pinjaman resmi. Oleh karena itu, warga yang ingin mengajukan pinjaman harus datang ke BRI di ibu kota kecamatan atau lembaga keuangan lain yang ada di ibu kota kabupaten. Sebanyak 9,8% keluarga di Cibulakan telah menerima pinjaman formal selama tiga tahun terakhir, hampir seluruhnya diberikan bank. Di sisi lain, untuk pinjaman informal warga meminjam dari tetangga. Sementara itu, 14,1% keluarga memiliki tabungan. Karena jumlah keluarga yang memiliki tabungan lebih banyak daripada mereka yang tidak memiliki pinjaman, sistem perbankan telah memindahkan

modal dari perdesaan ke perkotaan. Cara lain untuk mendapatkan uang adalah dengan menggadaikan aset. Sebanyak 4,1% keluarga telah menggadai asetnya selama tiga tahun terakhir dan 2,7% keluarga harus menjual asetnya untuk membayar utang.

Tabel VII.8 Karakteristik Finansial di Lokasi Proyek CBMS (%)

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Proporsi keluarga yang memiliki akses ke pasar kredit resmi	9,80	12,59	23,63	6,37
Proporsi keluarga yang menabung di lembaga resmi	14,08	11,58	15,92	15,64
Proporsi keluarga yang harus menggadai asetnya	4,13	0,93	2,52	1,65
Proporsi keluarga yang harus menjual asetnya untuk melunasi utang	2,66	1,08	3,10	2,20

Masyarakat Parakantugu biasanya mendatangi BRI di Kadupandak ketika berurusan dengan lembaga keuangan formal. Sebanyak 12,6% keluarga telah mendapatkan pinjaman resmi dan 11,6% memiliki tabungan. Hanya 0,9% keluarga yang menggadai asetnya dan hanya 1,1% yang terpaksa menjual asetnya untuk membayar utang.

Meskipun Kedondong hanya berjarak 8 km dari pusat kota dan di desa ini juga tersedia beberapa lembaga keuangan formal, hanya sebagian kecil keluarga yang berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut meski frekuensi hubungan dengan lembaga-lembaga ini terbilang lebih tinggi dibanding dengan ketiga desa lainnya. Tabel VII.8 menunjukkan bahwa kurang dari seperempat keluarga telah menarik pinjaman resmi dalam tiga tahun terakhir dan hanya 16% yang memiliki tabungan. Di pihak lain, 2,5% keluarga menggadaikan aset mereka selama tiga tahun terakhir sementara 3,1% dililit hutang dan terpaksa harus menjual asetnya.

Walaupun terdapat dua koperasi di Jungpasir, hanya 6,4% keluarga mendapat utang dalam tiga tahun terakhir. Hasil wawancara dengan para warga menyatakan bahwa kebanyakan mereka menerima pinjaman dari bank, sementara koperasi hanya menjadi pilihan ketiga setelah bank dan pemberi pinjaman informal seperti rentenir atau tukang riba. Sebanyak 15,6% keluarga telah memiliki tabungan. Terakhir, persentase keluarga yang telah menggadai asetnya relatif kecil, hanya sekitar 1,7% dan hanya 2,2% keluarga yang menjual asetnya untuk membayar utang.

E. PARTISIPASI POLITIK, KENYAMANAN DAN AKSES PADA INFORMASI

Menurut beberapa warga di Cibulakan pernah ada beberapa kejadian pembobolan pada tahun yang lalu, kebanyakan dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri. Mereka meyakini kejadian ini sebagai dampak dari semakin banyaknya remaja yang putus sekolah dan menganggur. Hal ini sesuai dengan data pada Tabel VII.5 yang menunjukkan bahwa separo anak-anak yang berusia 13 – 18 tahun di Cibulakan berstatus putus sekolah dan menganggur. Tabel VII.9 juga menunjukkan bahwa 2,8% keluarga adalah korban kejahatan pada satu tahun terakhir ini dan hampir semua dari mereka mendapatkan rumahnya diboboli maling.

Di pihak lain, ketiga desa lain sungguh jauh lebih nyaman karena hanya kurang dari 1% warga yang pernah menjadi korban tindak kejahatan dan kebanyakan kasus tersebut terjadi di luar desanya.

Tabel VII.9 Partisipasi Politik, Kenyamanan dan Akses pada Informasi Lokasi Proyek CBMS (%)

	Cibulakan	Parakantugu	Kedondong	Jungpasir
Proporsi keluarga yang pernah menjadi korban kejahatan (%)	2.8	0.31	0.72	0.16
Proporsi keluarga yang ikut pemilihan (%)	98.32	98.69	98.7	99.33
Proporsi keluarga yang mengakses TV dan surat kabar setiap minggu (%)	82.91	74.67	95.1	88.92

Warga di keempat desa tersebut juga secara politik aktif, lebih dari 98% orang dewasa ikut pemilu. Hal ini tampaknya didorong oleh akses informasi yang mudah. Partisipasi politik di Parakantugu tetap tinggi walaupun hanya 75% warga yang selalu menonton TV dan membaca surat kabar.

F. STATUS BKKBN DAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL

Karena status BKKBN sebagai lembaga resmi untuk mengidentifikasi keluarga miskin, maka penting untuk diketahui proporsi setiap klasifikasi di setiap desa dan distribusi penerima manfaat program JPS. Secara resmi, hanya keluarga yang termasuk dalam kategori paling bawah (Prasejahtera dan Sejahtera I) yang berhak menerima program JPS.¹³

Hanya terdapat 6,7% keluarga di Cibulakan yang dikategorikan sebagai Prasejahtera I, sementara tidak ada keluarga Sejahtera III plus. Sebanyak 37,1% diklasifikasi sebagai keluarga Sejahtera I, sehingga dalam teori kira-kira 44% warga di desa itu seharusnya menerima program JPS.

Dalam praktiknya, dapat diamati adanya tingkat kebocoran dan kekurangtercakupannya (*undercoverage*): hanya 72,6% dan 68,5% dari warga di dua kategori paling bawah tersebut menerima program Raskin,¹⁴ meski demikian 38,2% dan 15,6% dari kelompok Sejahtera II dan III secara berturut-turut telah menerima program Raskin. Dalam hal jumlah keluarga, jumlah keluarga Prasejahtera yang menerima program lebih sedikit dibanding dengan jumlah keluarga Sejahtera I dan Sejahtera II yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

¹³ Lihat Suryahadi dan Sumarto untuk penjelasan lengkap tentang Penentuan Sasaran JPS.

¹⁴ Program ini memberi hak bagi penerima manfaat untuk membeli beras dengan harga subsidi, kurang dari harga normal.

Fenomena yang sama dapat dicermati dari distribusi kartu sehat bagi masyarakat miskin¹⁵ penerima program. Terlebih lagi, jumlah keluarga nonmiskin yang menerima program juga lebih besar dibanding jumlah keluarga Prasejahtera yang menerima program ini.

Tabel VII.10 Status BKKBN dan Penerima Manfaat JPS

	Prasejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+
Cibulakan					
Proporsi di desa (%)	6,65	37,11	34,10	22,06	0
Menerima Program Raskin (%)	72,63	68,49	38,19	15,56	0
Menerima Program Kartu Sehat untuk masyarakat miskin (%)	16,84	14,91	4,11	4,13	0
Parakantugu					
Proporsi di desa (%)	33,90	41,47	16,53	6,72	0,31
Menerima Program Raskin (%)	22,10	17,69	4,21	0	0
Menerima Program Kartu Sehat untuk masyarakat miskin(%)	5,47	3,72	4,67	8,05	0
Kedondong					
Proporsi di desa (%)	50,29	26,45	14,16	7,95	0,79
Menerima Program Raskin (%)	96,26	93,44	93,88	76,36	63,64
Menerima Program Kartu Sehat untuk masyarakat miskin (%)	19,25	11,20	8,16	10,91	9,09
Jungpasir					
Proporsi di desa (%)	22,96	46,23	25,86	4,40	0,16
Menerima Program Raskin (%)	92,81	88,78	75,08	42,86	100
Menerima Program Kartu Sehat untuk masyarakat miskin (%)	56,51	44,73	25,53	7,14	50,0

Di Parakantugu, 33,9% dan 41,5% keluarga berturut-turut dikategorikan ke dalam dua kelas paling bawah, sementara 7% berada pada dua kelas tertinggi. Tampak lebih banyak terdapat kasus kekurangtercakupannya dibandingkan sekedar masalah kebocoran, yakni hanya 22,1% keluarga Prasejahtera dan 17,7% keluarga Sejahtera I yang menerima beras subsidi. Sementara itu, kebocoran lebih menonjol pada program Kartu Sehat, yakni 8,1% keluarga kaya menerima manfaat dari kartu tersebut sementara hanya 5,5% keluarga Prasejahtera dan 3,7% keluarga Sejahtera I yang menerima program ini.

Di Kedondong, tingkat kemiskinan berdasarkan data BKKBN adalah 50,3%, sementara 76,8% keluarga berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami menemukan bahwa hampir 95% dari mereka yang seharusnya menjadi penerima program telah menerimanya, dan hal ini menandai adanya kekurangtercakupannya. Namun yang lebih mengejutkan dari temuan kami adalah bahwa 76% dan 64% dari keluarga yang termasuk dalam dua kelas tertinggi kategori BKKBN juga menerima bantuan. Secara keseluruhan,

¹⁵ Penerima manfaat dari program ini akan mendapatkan kartu sehat yang memungkinkan mereka untuk mendapat layanan kesehatan secara gratis di fasilitas layanan umum.

sekitar 70% kelompok nonmiskin menerima manfaat dari program ini. Hal ini sesuai dengan informasi dari warga yang menyatakan bahwa beras subsidi telah dibagikan secara merata kepada warga tanpa peduli statusnya.

Hanya 20% dari kaum miskin yang menerima kartu layanan kesehatan dan sekitar 10% keluarga nonmiskin menerima kartu kesehatan di bawah program ini. Secara keseluruhan, kami menemukan masalah kekurangtercakupannya dan tingginya kebocoran, baik dari program Raskin maupun Kartu Sehat.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Desa Jungpasir memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi; 23% keluarga dikelompokkan sebagai masyarakat Prasejahtera, sementara hampir separo tergolong Sejahtera I. Hanya 4,6% keluarga di Jungpasir yang diklasifikasi sebagai masyarakat Sejahtera II dan Sejahtera III plus.

Jika melihat akses pada program bantuan pemerintah yang sarannya adalah keluarga dari dua kategori paling bawah (Prasejahtera dan Sejahtera I), ditemukan bahwa keluarga-keluarga dari setiap kategori bahkan menerima manfaat dari program tersebut. Proporsi keluarga yang menerima program-program tersebut menurun dari kelompok yang paling bawah hingga kelompok masyarakat Sejahtera III dan kemudian naik kembali pada kelompok teratas, di mana setiap keluarga dari kelompok Sejahtera III plus menerima beras bantuan. Aparat desa mengakui bahwa beras Raskin secara merata dibagi di antara para warga untuk menghindari kecemburuan yang dapat memicu konflik.

Hasil ini memperlihatkan bahwa mekanisme penentuan sasaran masih kurang memadai. Banyak alasan yang dapat dikemukakan, bermula dari lemahnya metodologi hingga praktek KKN yang dilakukan aparat di lapangan, juga hingga dalih bahwa masyarakat kaya pun menuntut bagiannya. Hal ini menuntut perbaikan untuk menjamin penentuan sasaran secara lebih tepat.

Keempat bagian berikutnya membahas tentang hasil PCA di setiap desa dan kami akan memberi bukti bahwa PCA berpotensi untuk meningkatkan metodologi penetapan sasaran.

VIII. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI DESA CIBULAKAN

A. INDIKATOR PENTING KESEJAHTERAAN

Tabel VIII.1. menyajikan 10 indikator yang berkoefisien tertinggi di Desa Cibulakan dari 63 indikator yang dipakai. Delapan dari 10 merupakan variabel kepemilikan dan lima indikator kesejahteraan teratas merupakan kepemilikan barang-barang elektronik.

Tabel VIII.1 Sepuluh Indikator Kesejahteraan yang Berperingkat Teratas di Cibulakan

Variabel	Skor	Peringkat
Memiliki kulkas	0,26	1
Memiliki TV	0,26	2
Memiliki telepon genggam	0,26	3
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,23	4
Memiliki kipas angin	0,22	5
Memiliki tabungan	0,22	6
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,20	7
Menggunakan WC pribadi	0,20	8
Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu	0,18	9
Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,18	10

B. KARAKTERISTIK KELUARGA TERKAYA DAN TERMISKIN

Berdasarkan skor kesejahteraan dari masing-masing keluarga, kami dapat mengisolasi 10% dari yang terkaya dan termiskin. Tabel VIII.2 menyajikan karakteristiknya masing-masing untuk membuktikan bahwa sungguh terdapat perbedaan antara mereka.

Terdapat kesenjangan yang teramat besar dalam hal kepemilikan aset antara keluarga kaya dan miskin. Ada 13 aset (dari 19 yang tercatat) yang dimiliki oleh keluarga kaya, tidak oleh keluarga miskin, di antaranya kulkas, telepon, kipas angin, pendingin ruangan, dan antena parabola. Dari kesemua aset tersebut, beberapa di antaranya dimiliki oleh keluarga miskin seperti radio, *tape recorder*, dan sepeda. Meski demikian, terdapat kesenjangan yang teramat besar dalam hal jumlah dan kemungkinan besar juga mutu, walaupun kuesioner tidak merekam data mengenai kualitas aset-aset tersebut. Dua jenis aset yang umumnya dimiliki oleh keluarga kaya dan keluarga miskin adalah tanah dan rumah. Mungkin ada beberapa alasan menyangkut kepemilikan atas kedua aset ini: kedudukannya yang teramat penting sehingga sangat diprioritaskan, atau merupakan harta warisan dari orang tua. Sementara itu, kepemilikan ternak selain ayam tampak jarang karena secara turun-temurun desa ini lebih dikenal sebagai desa penghasil padi.

Tabel VIII.2 Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin di Cibulakan

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Kepemilikan aset</i>	Memiliki kulkas	72,92	0
	Memiliki telepon	22,92	0
	Memiliki kipas angin	62,50	0
	Memiliki penyejuk udara (AC)	2,08	0
	Memiliki antena parabola	2,08	0
	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	69,44	0
	Memiliki TV warna	99,31	0
	Memiliki TV hitam putih	2,78	9,09
	Memiliki radio	54,17	4,20
	Memiliki <i>tape recorder</i>	70,14	2,10
	Memiliki komputer	14,58	0
	Memiliki mesin jahit	40,28	0
	Memiliki telepon genggam	75,69	0
	Memiliki alat elektronik lain	6,94	0
	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	43,75	0
	Memiliki mobil	26,39	0
	Memiliki sepeda	43,06	0,70
	Memiliki tanah	94,44	86,01
	Memiliki rumah	91,67	83,22
	<i>Kepemilikan binatang ternak</i>	Memiliki ayam	20,14
Memiliki kambing		2,08	0,7
Memiliki sapi		0,70	0
<i>Status perkawinan</i>	Kepala keluarga berstatus menikah	99,31	33,57
<i>Jenis kelamin kepala keluarga</i>	Kepala keluarga perempuan	1,39	58,04
<i>Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangan</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD	34,72	60,14
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	10,42	0,70
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	33,33	0
	Pendidikan kepala keluarga: Diploma	9,72	0
	Pendidikan kepala keluarga: universitas	10,42	0
	Pendidikan pasangan: SD	2,08	20,98
	Pendidikan pasangan: SLTP	43,06	12,59
	Pendidikan pasangan: SLTA	13,19	0
	Pendidikan pasangan: Diploma	30,56	0
	Pendidikan pasangan: Universitas	5,56	0
<i>Anggota keluarga yang bekerja</i>	Kepala keluarga bekerja	100	60,84
	Pasangan bekerja	27,78	11,89
	Sedikitnya satu anak usia sekolah yang bekerja	1,39	2,80

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Sektor kerja</i>	Keluarga bekerja di sektor pertanian	9,03	54,55
	Keluarga bekerja di sektor industri	2,78	1,40
	Keluarga bekerja di sektor perdagangan	22,92	4,90
	Keluarga bekerja di sektor jasa	60,42	2,80
	Menerima kiriman/tranfer dana (tidak bekerja)	4,86	36,36
<i>Akses terhadap lembaga keuangan</i>	Memiliki tabungan	67,36	0,70
	Menerima kredit dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir	32,64	0
	Menggadaikan aset selama tiga tahun terakhir	6,25	0
	Harus menjual aset untuk melunasi utang	4,86	0
<i>Konsumsi makanan dan indikator kesehatan</i>	Makan dua kali sehari	97,92	97,20
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu	90,97	13,99
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu	96,53	33,57
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu	98,61	40,56
	Mengupayakan pengobatan medis modern ketika sakit	95,14	74,83
	Meminum air dari sumber air yang aman	94,44	49,65
	Menggunakan WC pribadi	95,14	13,29
	Luas rumah per kapita keluarga lebih dari 8 meter persegi	94,44	82,52
	Tinggal di rumah berlantai tanah	0	0,70
	Pernah mengalami kematian bayi selama tiga tahun terakhir	5,56	0,70
	<i>Indikator kesejahteraan lain</i>	Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan	100
Sedikitnya satu anak usia sekolah yang putus sekolah		14,58	21,68
Angka ketergantungan tinggi (lebih dari separo anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)		10,42	7,69
Kebanyakan anggota keluarga membeli pakaian baru setidaknya sekali setahun		95,14	41,96
Pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir		4,86	1,40
<i>Partisipasi politik dan akses pada informasi</i>	Setidaknya satu anggota keluarga pernah ikut dalam pemilu yang terakhir dilaksanakan	99,31	92,31
	Menonton TV atau membaca surat kabar sedikitnya sekali seminggu.	100	44,06

Berdasarkan status perkawinan, hampir setiap kepala keluarga kaya berstatus menikah dan hanya 33,6% kepala keluarga miskin berstatus menikah. Kebanyakan keluarga miskin terdiri atas keluarga yang berorangtua tunggal atau hanya beranggotakan satu orang.

Perbedaan tingkat pendidikan para kepala keluarga kaya dan kepala keluarga miskin tampak mencolok. Sedikitnya 99,3% kepala keluarga kaya telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SD, 33,3% di antaranya telah lulus SLTP dan SLTA, dan 20,1% di antaranya telah menamatkan pendidikan tinggi. Sebaliknya, hampir semua kepala keluarga miskin (60,8%) yang pernah mengenyam pendidikan hanya dapat sampai pada

tingkat pendidikan dasar enam tahun dan tak satu pun yang pernah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SLTP.

Kesenjangan tingkat pendidikan antara pasangan keluarga miskin dan pasangan keluarga kaya bahkan lebih lebar. Pada keluarga miskin, berturut-turut 21% dan 12,6% di antara mereka telah memiliki pendidikan selama enam dan sembilan tahun, namun tak satu pun di antaranya yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi daripada SLTP. Sementara itu, 30,6% pasangan keluarga kaya memiliki tingkat pendidikan diploma dan 5,6% berpendidikan sarjana. Hanya 2% anggota keluarga yang tidak berpendidikan lebih tinggi daripada SD.

Dalam hal pekerjaan, setiap kepala keluarga kaya telah memiliki pekerjaan, sementara hanya 60,8% kepala keluarga miskin yang bekerja. Akan tetapi, ada sedikit pasangan baik dari keluarga kaya maupun keluarga miskin yang juga bekerja. Pada keluarga kaya terdapat 27,8% dari pasangannya yang bekerja dan keluarga miskin terdapat 11,9% pasangannya bekerja. Ada yang mengejutkan, 1,4% keluarga kaya sedikitnya memiliki satu anak usia sekolah yang bekerja.

Banyak keluarga kaya terlibat dalam sektor jasa dan perdagangan. Sebaliknya hanya segelintir keluarga miskin yang bergerak di sektor ini, kebanyakan mereka bergerak di sektor pertanian (54,4%). Hanya 9% keluarga kaya yang bermatapencaharian bertani. Fakta banyaknya keluarga miskin yang bekerja di sektor pertanian adalah imbas dari beberapa faktor seperti minimnya lahan dan rendahnya teknologi pertanian yang dimiliki. Di samping itu, 36,4% keluarga miskin bergantung pada kiriman dari luar untuk memenuhi kebutuhannya, sementara hanya 4,9% keluarga kaya yang menerima kiriman. Perbedaannya hanya terletak pada besarnya jumlah dan jenis kiriman/transfer. Keluarga miskin secara tidak tetap menerima transfer dari anggota keluarganya, sementara keluarga kaya umumnya menerima dana pensiun.

Sesuai dengan kepemilikan aset, keluarga kaya mendapatkan akses yang lebih besar pada lembaga keuangan formal. Kebanyakan keluarga kaya (67,4%) memiliki dana tabungan, sementara hampir tak satu pun keluarga miskin memiliki tabungan. Selama tiga tahun terakhir, 32,6% keluarga kaya menerima kredit dari lembaga keuangan formal dan 6,3% telah menggadaikan asetnya. Sebaliknya, tak satu pun keluarga miskin yang menerima kredit dari lembaga keuangan formal atau pun yang menggadaikan asetnya. Akibatnya, tak satu pun keluarga miskin yang terpaksa menjual asetnya untuk membayar utang, sementara terdapat 4,9% keluarga kaya yang terpaksa menjual asetnya untuk menutup utang.

Juga terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal pola konsumsi. Meskipun hampir setiap keluarga makan dua kali sehari, asupan proteinnya berbeda. Lebih dari 90% keluarga kaya mengkonsumsi daging, ikan, dan telur sedikitnya seminggu sekali, sementara hanya 14%, 33% dan 40,6% keluarga miskin yang dengan teratur mengkonsumsi daging, ikan dan telur secara berturut-turut.

Indikator kesehatan antara keluarga kaya dan keluarga miskin juga tampak berbeda. Sebanyak 95,1% keluarga kaya mengupayakan layanan kesehatan modern selama sakit, sementara keluarga miskin hanya 74,8%. Persentase keluarga kaya yang mengkonsumsi

air bersih dua kali lebih besar dibandingkan keluarga miskin. Dalam hal fasilitas WC pribadi, 95,1% keluarga kaya telah memiliki WC pribadi dan hanya 13,3% keluarga miskin memiliki WC pribadi. Sisanya menggunakan WC umum atau memakai WC tetangga. Lebih lagi, kebanyakan keluarga kaya memiliki luas rumah per kapita 8 meter persegi atau lebih dan meski sangat sedikit, 0,7% keluarga miskin masih tinggal di rumah berlantai tanah. Meskipun persentase keluarga kaya yang pernah mengalami kematian bayi berjumlah 4,9 titik persentase lebih tinggi dibanding keluarga miskin, kami yakin bahwa kematian bayi di kalangan keluarga kaya tidak terkait dengan kemiskinan atau minimnya akses pada kondisi tempat tinggal yang sehat.

Persentase anak usia sekolah yang putus sekolah sangat tinggi di kalangan keluarga miskin dan kaya, dengan tingkat 7,1 titik persentase lebih tinggi bagi kalangan keluarga miskin. Sementara, lebih banyak keluarga kaya memiliki rasio ketergantungan yang tinggi. Tampaknya hal ini tidak menjadi masalah karena 95,1% anggota keluarga kaya membeli pakaian sedikitnya sekali setahun, sementara keluarga miskin hanya 42% yang mampu membeli pakaian sedikitnya sekali setahun.

Pasokan listrik selalu tersedia, baik keluarga miskin atau keluarga kaya memiliki akses pada listrik. Dalam hal pengalaman menjadi korban kejahatan, keluarga kaya memiliki nilai lebih tinggi 3,5 titik persentase dibanding keluarga miskin. Sekali lagi, hal ini merupakan imbas dari tingkat kepemilikan aset yang dimiliki keluarga kaya.

Tingkat partisipasi politik hampir sama tingginya, rata-rata di atas 90%, namun ada perbedaan signifikan dalam hal akses terhadap informasi. Setiap keluarga kaya memiliki akses pada televisi dan surat kabar, sementara kurang dari separo keluarga miskin yang dapat mengakses televisi dan surat kabar.

IX. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DESA PARAKANTUGU

A. INDIKATOR KESEJAHTERAAN UTAMA

Tabel IX.1 menyajikan 10 variabel yang paling membedakan tingkat kesejahteraan di Parakantugu. Delapan di antaranya adalah variabel kepemilikan, sementara dua lainnya adalah tabungan dan tingkat pendidikan kepala keluarga. Kepemilikan kulkas merupakan variabel dengan nilai koefisien positif tertinggi, sementara di pihak lain keluarga dengan kepala keluarga yang hanya mengenyam pendidikan dasar enam tahun kemungkinan besar adalah keluarga miskin.

Tabel IX.1 Sepuluh Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Parakantugu

Variabel	Skor	Peringkat
Memiliki kulkas	0,26	1
Memiliki telepon	0,25	2
Memiliki tabungan	0,24	3
Memiliki kipas angin	0,24	4
Memiliki antena parabola	0,24	5
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,24	6
Memiliki TV warna	0,24	7
Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,22	8
Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,20	9
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,19	10

B. KARAKTERISTIK KELUARGA TERKAYA DAN TERMISKIN

Tabel IX.2 menyajikan perbandingan karakteristik antara kelompok kaya dan kelompok miskin di Parakantugu. Keluarga miskin hanya memiliki TV hitam putih dan radio, sementara keluarga kaya memiliki hampir setiap variabel kepemilikan. Keduanya sama-sama memiliki tanah dan rumah. Seperti di desa-desa lain, rumah dan tanah biasanya merupakan warisan dari orang tuanya. Berkenaan dengan kepemilikan hewan ternak, kebanyakan keluarga miskin memelihara ayam dan kambing.

Berkenaan dengan status perkawinan, 95,4% keluarga kaya memiliki kepala keluarga dan pasangannya, sementara pada keluarga miskin hanya terdapat 60,5% yang memiliki kepala keluarga dan pasangannya. Hanya 4,7% keluarga kaya yang kepala keluarganya perempuan, dibandingkan 34,9% kepala keluarga perempuan pada keluarga miskin.

Mayoritas tingkat pendidikan kepala keluarga kaya adalah SLTP atau SLTA, sedangkan 90% kepala keluarga miskin hanya berpendidikan SD. Menariknya, 60% pasangan dalam keluarga miskin berpendidikan SLTP dan sisanya hampir 40% tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya. Sebagai perbandingan, tingkat pendidikan pasangan dalam keluarga kaya umumnya lebih merata tingkatnya, dengan lebih dari 50% telah menempuh pendidikan hingga tingkat SLTA atau lebih.

Dalam kategori pekerjaan, 99,2% kepala keluarga kaya berstatus bekerja dan hanya 73,6% kepala keluarga miskin memiliki pekerjaan. Terlebih lagi, 33,3% pasangan keluarga kaya juga bekerja dibandingkan hanya 4,7% pasangan keluarga miskin yang bekerja.

Tabel IX.2 Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Kepemilikan aset</i>	Memiliki kulkas	66,70	0
	Memiliki telepon	50,40	0
	Memiliki kipas angin	68,20	0
	Memiliki penyejuk udara/AC	1,60	0
	Memiliki antena parabola	54,30	0
	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	73,60	0
	Memiliki TV berwarna	96,10	0
	Memiliki TV hitam putih	3,90	4,00
	Memiliki radio	65,10	4,70
	Memiliki <i>tape recorder</i>	67,40	0
	Memiliki komputer	4,70	0
	Memiliki mesin jahit	34,10	0
	Memiliki telepon genggam	7,00	0
	Memiliki alat elektronik lain	39,50	0
	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	72,90	0
	Memiliki mobil	10,90	0
	Memiliki sepeda	42,60	0
	Memiliki tanah	99,20	90,70
	Memiliki rumah	99,20	92,30
<i>Kepemilikan binatang ternak</i>	Memiliki ayam	32,60	44,20
	Memiliki kambing	6,20	12,40
	Memiliki sapi	2,30	2,30
<i>Status perkawinan</i>	Kepala keluarga berstatus menikah	95,40	60,50
<i>Jenis kelamin kepala keluarga</i>	Kepala keluarga perempuan	4,70	34,90
<i>Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD	33,30	90,70
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	27,10	0,80
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	27,90	0
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	3,10	0
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	7,80	0
	Pendidikan pasangan: SD	1,60	0,80
	Pendidikan pasangan: SLTP	34,10	59,70
	Pendidikan pasangan: SLTA	25,60	0,00
	Pendidikan pasangan: diploma	25,60	0,00
Pendidikan pasangan: sarjana	4,70	0,00	
<i>Anggota keluarga yang bekerja</i>	Kepala keluarga bekerja	99,20	73,60
	Pasangan bekerja	33,30	4,70
	Sedikitnya satu anak usia sekolah bekerja	0,80	0
<i>Sektor kerja</i>	Keluarga bekerja di sektor pertanian	11,60	70,50
	Keluarga bekerja di sektor industri	1,60	0
	Keluarga bekerja di sektor perdagangan	31,00	2,30
	Keluarga bekerja di sektor jasa	50,40	3,10
	Keluarga menerima transfer (menganggur)	5,40	24,00

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)	
<i>Akses terhadap lembaga keuangan</i>	Memiliki tabungan	65,90	0	
	Menerima kredit dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir	41,90	0	
	Menggadai aset pada tiga tahun terakhir	2,30	0	
	Harus menjual aset untuk membayar utang	2,30	0,80	
<i>Konsumsi makanan dan Indikator kesehatan</i>	Makan dua kali sehari	98,50	96,10	
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu	100	84,50	
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu	100	90,70	
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu	98,50	94,60	
	Mengupayakan pengobatan medis modern ketika sakit	99,20	69,80	
	Mengonsumsi air dari sumber yang aman	100	85,30	
	Menggunakan WC pribadi	99,20	16,30	
	Luas rumah keluarga per kapita lebih dari 8 meter persegi	99,20	86,80	
	Tinggal di rumah berlantai tanah	0	3,10	
	Pernah mengalami kematian bayi pada 3 tahun terakhir	1,60	1,60	
	<i>Indikator kesejahteraan lain</i>	Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan	100	91,50
		Sedikitnya satu anak usia sekolah yang putus sekolah	10,10	11,60
Tingkat ketergantungan tinggi (lebih dari separo anggota keluarga berusia kurang dari 15 tahun)		6,20	4,70	
Kebanyakan anggota membeli pakaian baru sedikitnya sekali setahun.		88,40	9,30	
Pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir		0	0	
<i>Partisipasi politik dan akses pada informasi</i>	Sedikitnya salah satu anggota keluarga mengikuti pemilihan umum	100	92,25	
	Senonton TV dan membaca koran sedikitnya sekali seminggu	100	14,00	

Jika dicermati dari sektor kerja, 70,5% keluarga miskin bekerja di sektor pertanian, dan keluarga kaya umumnya bekerja di sektor jasa (50,4%) dan perdagangan (31%). Hanya 11,6% keluarga kaya yang bekerja di sektor pertanian. Di samping itu, hampir seperempat keluarga miskin bergantung pada dana transfer dari pihak lain.

Akses pada lembaga keuangan hanya terbatas pada orang kaya, 66% keluarga kaya memiliki tabungan dan 42% telah menerima kredit.

Meski berbeda, baik keluarga kaya maupun yang miskin memiliki pola konsumsi dan asupan protein yang cukup. Di pihak lain, terdapat kesenjangan yang besar dalam hal indikator kesehatan lain. Hampir setiap keluarga kaya mengupayakan pengobatan medis

modern sementara hanya 70% dari keluarga miskin dapat mengupayakan layanan medis modern. Hampir setiap keluarga kaya juga memiliki WC pribadi dan hanya 16,3% keluarga miskin yang memilikinya. Terakhir, terdapat segelintir keluarga miskin yang belum dapat mengakses penerangan listrik.

Baik keluarga kaya maupun keluarga miskin sama-sama memiliki anak usia sekolah yang telah putus sekolah dengan persentase masing-masing 10,1% dan 11,6% secara berturut-turut. Lebih lanjut, banyak keluarga kaya yang masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, meskipun hal ini tampaknya tidak menjadi persoalan.

Keluarga kaya lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Setiap orang dewasa dari keluarga kaya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terakhir, sementara pada keluarga miskin hanya 92,3% orang dewasa yang menggunakan hak pilihnya. Kesenjangan yang tajam antara keluarga kaya dan keluarga miskin dapat juga dilihat dari aksesnya terhadap informasi. Hanya 14% keluarga miskin yang secara tetap menonton televisi atau membaca koran, dibandingkan keluarga kaya 100%.

X. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DESA KEDONDONG

A. INDIKATOR PENTING TENTANG KESEJAHTERAAN

Selain dari 63 indikator kesejahteraan yang ada dalam Tabel V.1, variabel yang paling positif adalah memiliki TV berwarna dan variabel yang paling negatif adalah jika keluarga memiliki kepala keluarga perempuan. Tabel X.1 menyediakan 10 indikator kesejahteraan dengan nilai koefisien tertinggi, positif maupun negatif.

Tabel X.1 Sepuluh Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kedondong

Variabel	Skor	Peringkat
Memiliki TV warna	0,28	1
Memiliki kipas angin	0,26	2
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,25	3
Kepala keluarga perempuan	-0,23	4
Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,23	5
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,23	6
Kepala keluarga berstatus menikah	0,22	7
Memiliki sepeda/perahu	0,22	8
Memanfaatkan WC pribadi	0,21	9
Tinggal di rumah berlantai tanah	-0,21	10

Variabel kepemilikan aset mencakup enam dari 10 variabel dalam tabel tersebut, yang berarti keenam variabel tersebut dengan tepat membedakan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dari keluarga lainnya. Sementara itu, dua variabel dengan koefisien negatif yang tercantum dalam daftar adalah tinggal di rumah berlantai tanah dan memiliki kepala keluarga perempuan.

Keluarga terkaya memiliki skor sejahtera 8,98 dan yang termiskin mendapat -7,98. Kepala keluarga terkaya adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan sarjana, pasangannya juga sarjana dan keluarga tersebut bekerja di sektor jasa. Di pihak lain, keluarga termiskin dikepalai oleh perempuan yang tidak tamat SD dan menganggur.

Bagian berikutnya merinci karakteristik 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin di Kedondong.

B. KARAKTERISTIK KELUARGA TERKAYA DAN TERMISKIN

Karakteristik 10% keluarga terkaya dan termiskin di Kedondong dapat dilihat pada daftar Tabel X.2. Karena telah jelas bahwa kepemilikan aset menyebabkan perbedaan yang menonjol dalam kondisi sejahtera, kami hanya membahas perbedaan lain dalam karakteristik orang kaya dan orang miskin di Kedondong.

Tabel X.2 Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Kepemilikan aset</i>	Memiliki kulkas	43,17	0
	Memiliki telepon	7,91	0
	Memiliki kipas angin	94,97	3,62
	Memiliki pendingin ruangan (AC)	3,60	0
	Memiliki parabola	0,72	0
	Memiliki DVD/VCD player	91,37	0
	Memiliki TV warna	99,28	2,17
	Memiliki TV hitam-putih	2,16	2,17
	Memiliki radio	80,58	14,49
	Memiliki tape recorder	85,61	0,72
	Memiliki komputer	3,60	0
	Memiliki mesin jahit	14,39	0
	Memiliki telepon genggam	50,36	0
	Memiliki alat elektronik	20,86	0,72
	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	87,05	0,72
	Memiliki mobil	11,51	0
Memiliki sepeda	94,25	12,32	
Memiliki tanah	99,28	84,78	
Memiliki rumah	96,40	74,64	
<i>Kepemilikan binatang ternak</i>	Memiliki ayam	37,41	59,42
	Memiliki kambing	0	1,45
	Memiliki sapi	0	0,72
<i>Status Perkawinan</i>	Kepala keluarga berstatus menikah	100	29,71
<i>Jenis kelamin kepala keluarga</i>	Kepala keluarga perempuan	0,72	80,44
<i>Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangan</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD	59,71	20,29
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	14,39	0
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	13,67	0
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	5,76	0
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	5,04	0
	Pendidikan pasangan: SD	3,60	28,26
	Pendidikan pasangan: SLTP	58,99	1,45
	Pendidikan pasangan: SLTA	18,71	0
	Pendidikan pasangan: diploma	12,23	0
	Pendidikan pasangan: sarjana	4,32	0
<i>Anggota keluarga yang bekerja</i>	Kepala keluarga bekerja	99,28	75,36
	Pasangan bekerja	74,10	2,90
	Sedikitnya satu anak usia sekolah bekerja	0,72	0,72
<i>Sektor kerja</i>	Keluarga bekerja di sektor pertanian	14,39	68,39

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
	Keluarga bekerja di sektor industri	12,23	2,17
	Keluarga bekerja di sektor perdagangan	26,62	4,34
	Keluarga bekerja di sektor jasa	46,04	2,17
	Keluarga menerima transfer (menganggur)	0	23,91
<i>Akses terhadap lembaga keuangan</i>	Memiliki tabungan	64,03	0,72
	Menerima kredit dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir	46,76	2,17
	Menggadaikan aset selama tiga tahun terakhir	6,48	0,72
	Harus menjual aset untuk membayar utang	5,04	2,90
<i>Tingkat konsumsi makanan dan indikator kesehatan</i>	Makan dua kali sehari	100	97,82
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu.	86,33	26,09
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu	99,28	93,48
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu	97,84	65,94
	Mengupayakan layanan medis yang modern ketika sakit	97,48	83,33
	Mengonsumsi air dari sumber yang aman	94,96	78,26
	Menggunakan WC pribadi	92,81	11,59
	Luas rumah per keluarga lebih dari 8 meter persegi	98,56	93,48
	Tinggal di rumah berlantai tanah	3,60	80,43
	Pernah mengalami kematian bayi selama 3 tahun terakhir	2,16	2,17
<i>Indikator kesejahteraan lain</i>	Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan	100	93,48
	Sedikitnya satu anak usia sekolah yang telah putus sekolah	8,63	1,45
	Tingkat ketergantungan yang tinggi (lebih dari separo anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	6,48	0,72
	Kebanyakan anggota keluarga membeli pakaian baru sedikitnya sekali setahun	93,53	75,36
	Pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir	2,88	0
<i>Partisipasi politik dan akses pada informasi</i>	Sedikitnya satu anggota keluarga mengikuti pemilihan umum	100	91,30
	Menonton televisi atau membaca koran sedikitnya sekali seminggu	100	81,88

Dalam hal pendidikan, hanya 20,3% kepala keluarga miskin yang menyelesaikan pendidikan dasarnya dan tak satu pun meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, hampir 60% kepala keluarga kaya menyelesaikan pendidikan dasar dan hampir 30% darinya telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan SLTA dan hampir 10% darinya telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Hampir tidak ada keluarga nonmiskin yang kepala keluarganya yang tidak menamatkan SD. Disparitas antara kelompok kaya dan miskin bahkan lebih besar lagi dalam hal tingkat pendidikan pasangannya.

Dalam karakteristik pekerjaan, hampir setiap kepala keluarga kaya berstatus bekerja, dibandingkan dengan 75% kepala keluarga miskin. Terlebih lagi, 74% pasangan dari keluarga kaya juga bekerja dan hanya 3% pasangan dari keluarga miskin yang bekerja. Proporsi anak usia sekolah yang bekerja antara keluarga kaya dan miskin sama.

Hampir separo dari keluarga kaya bekerja di sektor jasa, seperempatnya di sektor perdagangan, dan 14%nya di sektor pertanian. Sebaliknya, 68% keluarga miskin berada di sektor pertanian dan hampir seperempatnya menganggur.

Dari segi akses pada lembaga keuangan formal, 64% keluarga kaya memiliki tabungan dan hanya 0,7% keluarga miskin yang memiliki tabungan. Terlebih lagi, hampir separo dari keluarga kaya telah mengambil kredit dari lembaga-lembaga keuangan formal dibandingkan dengan hanya 2% keluarga miskin. Keadaan ini mungkin disebabkan endogenitas, hal yang dapat dipahami karena keluarga kaya dapat menerima pinjaman hanya karena mereka kaya.

Dua variabel lain dalam kelompok variabel finansial menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Sebanyak 6,5% keluarga kaya telah menggadaikan asetnya, sementara pada keluarga miskin hanya 0,7% keluarga. Kembali, hal ini terjadi akibat fakta bahwa keluarga miskin tidak memiliki aset untuk digadaikan. Sama halnya juga bahwa 5% keluarga kaya harus menjual asetnya untuk melunasi utang, sementara keluarga miskin hanya 2,9%.

Dari segi konsumsi makanan dan indikator kesehatan, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam hal konsumsi daging. Sebanyak 86% keluarga kaya mengkonsumsi daging setiap minggu, sebaliknya pada keluarga miskin hanya seperempat yang mengkonsumsi daging. Persentase keluarga yang mencari layanan medis modern, baik bagi keluarga miskin maupun kaya sama-sama tinggi, meskipun ada perbedaan 14 titik persentase. Di pihak lain, 93% keluarga kaya telah memiliki WC di rumahnya, dan keluarga miskin hanya 12%. Demikian pun, 80% keluarga miskin tinggal di rumah berlantai tanah dan keluarga kaya hanya 3,6%.

Fakta yang menarik adalah bahwa di antara keluarga kaya, 8,6% di antaranya memiliki sedikitnya seorang anak yang putus sekolah sementara angka ini jauh lebih rendah di masyarakat miskin, yakni hanya 1,5%. Ini mungkin karena endogenitas, meskipun perlu dilakukan suatu investigasi untuk menentukan penyebabnya.

Terakhir, baik keluarga kaya maupun keluarga miskin tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dalam hal partisipasi politik dan akses pada informasi, meski keluarga kaya tetap memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam aktivitas politik dan akses informasi.

XI. HASIL PCA: PROFIL KEMISKINAN DI DESA JUNGPASIR

A. INDIKATOR PENTING MENGENAI KEMISKINAN

Tabel XI.1 menunjukkan daftar 10 indikator yang memiliki koefisien tertinggi di Jungpasir dari 63 indikator yang diperkirakan. Karena skor indikator kesembilan hingga kesebelas hanya berbeda tipis, tabel juga menyertakan indikator kesebelas. Dari tabel tersebut, nampak bahwa sembilan dari indikator tertinggi adalah kepemilikan aset. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset, khususnya kepemilikan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor roda dua, bertindak sebagai penentu tingkat kesejahteraan keluarga yang paling handal. Dari 11 indikator tersebut, hanya terdapat satu yang negatif, yakni tinggal di rumah berlantai tanah. Keluarga terkaya memiliki tingkat sejahtera dengan skor 6,94, dan yang termiskin dengan skor -7,33.

Tabel XI.1 Sebelas Indikator Kesejahteraan yang Berperingkat Tertinggi di Jungpasir

Variabel	Skor	Peringkat
Memiliki kipas angin	0,27	1
Memiliki TV warna	0,26	2
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,26	3
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,25	4
Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,25	5
Memiliki kulkas	0,23	6
Memiliki telepon genggam	0,22	7
Menggunakan WC pribadi	0,21	8
Memiliki alat elektronik	0,19	9
Memiliki radio	0,19	10
Tinggal di rumah berlantai tanah	-0,19	11

B. KARAKTERISTIK KELUARGA TERKAYA DAN TERMISKIN

Tabel XI.2 menyajikan karakteristik perbandingan dari 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin berdasarkan pada 63 indikator kesejahteraan. Seperti halnya Tabel X.2, Tabel XI.2 memperlihatkan adanya kesenjangan yang amat besar dalam hal kepemilikan aset antara yang kaya dan miskin. Tak satu pun dari 10% keluarga termiskin yang memiliki kulkas, telepon, penyejuk udara (AC), parabola, komputer, atau mobil. Hanya segelintir masyarakat miskin yang memiliki kipas angin, DVD/VCD *player*, TV warna, radio, *tape* dan kendaraan bermotor roda dua. Semuanya dimiliki oleh kebanyakan keluarga kaya. Satu-satunya aset yang umum dimiliki oleh yang kaya atau yang miskin adalah tanah dan rumah. Keluarga miskin mungkin mewariskan aset ini karena aset ini yang paling berharga di desa. Kemungkinan kedua, adalah luas tanah/rumah yang dimiliki oleh keluarga kaya jauh lebih besar dibanding yang dimiliki keluarga miskin. Tidak banyak keluarga yang memiliki binatang ternak seperti sapi dan domba karena Desa Jungpasir mengandalkan kegiatan perekonomian pada kegiatan pertanian.

Dilihat dari status perkawinan, hampir setiap keluarga kaya memiliki kepala keluarga dan pasangannya (98,4%), sementara hanya 30,7% dari keluarga miskin yang berstatus menikah dan sisanya adalah keluarga yang beranggota satu, biasanya janda manula.

Tingkat pendidikan kepala keluarga dari keluarga kaya juga lebih tinggi dari kepala keluarga miskin. Sebanyak 81,3% keluarga kaya telah menamatkan pendidikan formal, di antaranya 14,8% telah menamatkan pendidikan SLTA dan hampir 11% memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Sebaliknya, hanya 15,8% kepala keluarga di kalangan keluarga miskin telah menamatkan pendidikan formal (12,6% tamat pendidikan dasar, 3,2% tamat SLTP), sementara sisanya berpendidikan kurang dari enam tahun (putus sekolah di tingkat pendidikan dasar). Tingkat pendidikan pasangannya memperlihatkan keadaan yang mirip. Sebanyak 94,5% pasangan di keluarga kaya telah menamatkan pendidikan formal dibanding hanya 30,7% pasangan di keluarga miskin. Terlebih lagi, 24,2% pasangan keluarga kaya telah menamatkan pendidikan SLTA dan 21,1% telah tamat dari akademi/universitas. Di antara masyarakat miskin hanya 3,9% yang telah menamatkan pendidikan SLTP dan 3,2% yang menamatkan pendidikan SLTA.

Tabel XI.2 Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Kepemilikan aset</i>	Memiliki kulkas	81,25	0
	Memiliki telepon	23,44	0
	Memiliki kipas	96,09	2,36
	Memiliki penyejuk udara (AC)	7,81	0
	Memiliki parabola	0,78	0
	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	93,75	0,79
	Memiliki TV warna	99,22	7,09
	Memiliki TV hitam-putih	7,81	2,36
	Memiliki radio	82,03	7,09
	Memiliki <i>tape recorder</i>	92,97	1,57
	Memiliki komputer	10,94	0
	Memiliki mesin jahit	21,88	0,79
	Memiliki telepon genggam	79,69	0,79
	Memiliki alat elektronik lain	67,19	1,57
	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	91,41	0,79
		Memiliki mobil	18,75
Memiliki sepeda		85,94	22,83
Memiliki tanah		91,41	81,11
Memiliki rumah		85,16	72,44
<i>Kepemilikan hewan ternak</i>		Memiliki ayam	21,88
	Memiliki kambing	2,34	3,15
	Memiliki sapi	0	0
<i>Status perkawinan</i>	Kepala keluarga berstatus menikah	98,44	30,71
<i>Jenis kelamin kepala keluarga</i>	Kepala keluarga perempuan	1,56	69,29

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)	
<i>Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD	39,06	12,60	
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	16,41	3,15	
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	14,84	0	
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	6,25	0	
	Pendidikan kepala keluarga: universitas	4,69	0	
	Pendidikan pasangan: SD	19,53	23,62	
	Pendidikan pasangan: SLTP	29,69	3,94	
	Pendidikan pasangan: SLTA	24,22	3,15	
	Pendidikan pasangan: diploma	16,41	0	
	Pendidikan pasangan: universitas	4,69	0	
	<i>Anggota keluarga yang bekerja</i>	Kepala keluarga bekerja	100	77,17
		Pasangan bekerja	85,94	8,66
Sedikitnya satu anak usia sekolah bekerja		0	1,57	
<i>Sektor kerja</i>		Keluarga bekerja di sektor pertanian	7,81	58,27
	Keluarga bekerja di sektor industri	3,12	0,79	
	Keluarga bekerja di sektor perdagangan	74,22	8,66	
	Keluarga bekerja di sektor jasa	14,06	6,29	
	Keluarga menganggur dan menerima transfer	0	25,20	
<i>Akses terhadap lembaga keuangan</i>	Memiliki tabungan	62,50	0,79	
	Menerima kredit dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir.	17,97	0	
	Menggadai aset selama tiga tahun terakhir	3,91	0	
	Harus menjual aset untuk membayar utang	4,69	0,79	
<i>Indikator tingkat konsumsi makanan dan indikator kesehatan</i>	Makan dua kali sehari	100	92,91	
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu	87,50	16,54	
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu	100	77,17	
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu	99,22	66,14	
	Mengupayakan pengobatan medis modern ketika sakit	93,75	95,28	
	Mengonsumsi air dari sumber yang aman	73,44	37,01	
	Menggunakan WC pribadi	97,66	21,26	
	Luas rumah keluarga per kapita lebih dari 8 meter persegi	94,53	92,13	
	Tinggal di rumah berlantai tanah	0	67,72	
	Pernah mengalami kematian bayi selama 3 tahun terakhir	3,13	0	

Kelompok variabel	Variabel	Proporsi 10% keluarga terkaya (%)	Proporsi 10% keluarga termiskin (%)
<i>Indikator kesejahteraan lain</i>	Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan	100	94,49
	Sedikitnya satu anak usia sekolah putus sekolah	4,69	2,36
	Tingkat ketergantungan tinggi (lebih dari separo anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	11,72	3,15
	Kebanyakan anggota keluarga membeli baju baru sedikitnya sekali setahun	93,75	40,16
	Pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir	1,56	0
<i>Partisipasi politik dan akses pada informasi</i>	Sedikitnya seorang anggota keluarga ikut memilih dalam pemilu terakhir	100	99,21
	Menonton TV atau membaca surat kabar sedikitnya sekali seminggu	99,22	51,18

Terkait dengan pekerjaan, kepala keluarga kaya semuanya bekerja, sementara yang miskin angka pekerjanya hanya 77,2%. Terlebih lagi, 85,9% pasangan di antara keluarga kaya juga bekerja, sedangkan di keluarga miskin hanya 8,7% dari mereka yang bekerja. Tidak ada pekerja anak di keluarga kaya, sementara di 1,6% keluarga miskin di mana ada pekerja anak. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin terpaksa bekerja untuk membantu menafkahi keluarganya.

Sekitar seperempat keluarga miskin tidak bekerja dan bergantung pada kiriman dari kerabatnya. Kebanyakan orang kaya (74%) bekerja di sektor perdagangan dan 14% bekerja di sektor jasa. Secara berturut-turut hanya 8,7% dan 6,3% keluarga miskin yang terlibat dalam kedua sektor tersebut. Di pihak lain, hanya 7,8% keluarga kaya bergerak di sektor pertanian, dibandingkan 58,3% keluarga miskin yang bergerak di sektor yang sama. Keadaan ini dapat menciptakan dua implikasi kebijakan yang bertolak belakang. Pertama, sektor pertanian perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang bergerak di sektor ini atau kedua, keluarga yang bergerak di sektor pertanian perlu beralih ke sektor perdagangan dan jasa agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kebanyakan keluarga kaya memiliki tabungan di lembaga keuangan formal, sementara hampir tidak satupun keluarga miskin memiliki tabungan. Tidak seperti keluarga kaya, tak satu pun keluarga miskin pernah menggadai asetnya atau menerima kredit dari lembaga keuangan formal. Ini mungkin akibat dari tidak adanya aset bagi keluarga miskin untuk digadai sebagai barang jaminan. Akan tetapi, terdapat juga keluarga miskin yang terpaksa menjual aset untuk melunasi kreditnya.

Meskipun hampir semua keluarga miskin makan dua kali sehari (92%), hanya 16,5% di antaranya secara berkala tetap mengkonsumsi daging. Sebaliknya, 87,5% keluarga kaya secara berkala mengkonsumsi daging. Meskipun konsumsi telur dan ikan relatif tinggi di kedua jenis keluarga tersebut, perbedaan dalam hal frekuensi konsumsi ikan dan telur antara keduanya masih tetap berbeda, yakni 22,8 dan 33,1 titik persentase secara berturut-turut.

Tidak ada perbedaan yang tajam dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan resmi di kalangan keluarga kaya dan keluarga miskin. Keluarga miskin bahkan memiliki prevalensi masalah kesehatan lebih rendah dalam beberapa indikator. Contoh, tidak terdapat kematian bayi di antara keluarga miskin namun 3% dari keluarga kaya pernah mengalaminya, meskipun tidak diketahui alasan kematiannya. Kebanyakan keluarga kaya mengkonsumsi air bersih dari sumber yang aman, sementara hanya 37% keluarga miskin yang mengkonsumsi air bersih dari sumber yang aman. Secara umum, keluarga kaya memiliki WC pribadi, namun hanya 21,3% keluarga miskin yang memiliki WC pribadi. Meski hampir setiap keluarga memiliki luas rumah per kapita yang cukup, namun 67,7% keluarga miskin masih menempati rumah berlantai tanah.

Menariknya, proporsi keluarga kaya yang memiliki anak yang putus sekolah adalah 2,3 titik persentase lebih tinggi dibanding keluarga miskin. Ada beberapa kemungkinan penyebab fenomena ini, anak usia sekolah lebih sedikit dalam keluarga miskin; minat belajar yang rendah di kalangan keluarga kaya, atau rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan di kalangan keluarga kaya. Asumsi terakhir mungkin kurang dapat diterima karena tingkat pendidikan orang tua pada masyarakat kaya relatif lebih tinggi. Asumsi pertama mungkin memiliki beberapa kebenaran di dalamnya, karena 11,7% keluarga kaya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, dibanding dengan tingkat ketergantungan keluarga miskin yang hanya 3,2%. Namun, keluarga kaya memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi seperti terlihat dalam kepemilikan aset dan indikatornya.

Di Desa Jungpasir, setiap keluarga memiliki akses pada listrik. Sebanyak 1,6% keluarga kaya menderita akibat aksi kejahatan, dan tidak ada keluarga miskin yang menjadi korban selama setahun terakhir. Hal ini dapat dimengerti karena orang miskin tidak memiliki aset.

Tingginya partisipasi politik di antara keduanya tidak berbeda meskipun hanya separo dari anggota keluarga miskin yang memiliki akses pada surat kabar dan televisi, dibandingkan 99,2% keluarga kaya yang dapat mengakses surat kabar dan televisi.

XII. PERBANDINGAN HASIL-HASIL PCA

Penting sekali dicatat bahwa PCA telah memungkinkan estimasi indikator kemiskinan tertentu yang bersifat lokal. Tabel XII.1 menunjukkan indikator kemiskinan yang berbeda-beda di empat desa CBMS dan jelas sekali bahwa meskipun secara umum variabel kepemilikan aset memberi prediksi terbaik akan kemiskinan di masing-masing desa, tapi terdapat perbedaan-perbedaan yang amat tegas dalam jenis-jenis asetnya.

Walaupun di empat desa terdapat kesamaan aset elektronik sebagai pembobot yang terbesar, namun terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut misalnya, variabel kepemilikan nonaset yang dapat memprediksi kemiskinan di Jungpasir adalah jenis lantai rumah dan pemilikan WC pribadi, sementara di Kedondong, meskipun di wilayah yang sama dengan Jungpasir, jenis kelamin kepala keluarga dan status perkawinannya menjadi dasar yang lebih baik untuk memprediksi kemiskinan dibandingkan kepemilikan WC pribadi.

Tabel XII.1 Sepuluh Variabel Berbobot Paling Tinggi di Wilayah Uji Coba CBMS

Cibulakan		Parakantugu	
<i>Variabel</i>	<i>Bobot</i>	<i>Variabel</i>	<i>Bobot</i>
Memiliki kulkas	0,26	Memiliki kulkas	0,26
Memiliki TV warna	0,26	Memiliki telepon	0,25
Memiliki telepon genggam	0,26	Memiliki tabungan	0,24
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,23	Memiliki kipas angin	0,24
Memiliki kipas angin	0,22	Memiliki antene parabola	0,24
Memiliki tabungan	0,22	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,24
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,20	Memiliki TV warna	0,24
Menggunakan WC pribadi	0,20	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,21
Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu	0,18	Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,20
Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,18	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,19
Kedondong		Jungpasir	
<i>Variabel</i>	<i>Bobot</i>	<i>Variabel</i>	<i>Bobot</i>
Memiliki TV warna	0,28	Memiliki kipas angin	0,27
Memiliki kipas angin	0,26	Memiliki TV warna	0,26
Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,25	Memiliki DVD/VCD <i>player</i>	0,26
Kepala keluarga perempuan	-0,23	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,25
Memiliki kendaraan roda dua	0,23	Memiliki kendaraan bermotor roda dua	0,25
Memiliki <i>tape recorder</i>	0,23	Memiliki kulkas	0,23
Kepala keluarga berstatus menikah	0,22	Memiliki telepon genggam	0,22
Memiliki sepeda atau perahu	0,22	Menggunakan WC pribadi	0,21
Menggunakan WC pribadi	0,21	Memiliki alat elektronik lain	0,19
Tinggal di rumah berlantai tanah	-0,21	Memiliki radio	0,19
		Tinggal di rumah berlantai tanah	-0,19

Terdapat juga perbedaan indikator kemiskinan yang signifikan di desa-desa di Cianjur. Di Parakantugu, hanya terdapat satu variabel nonaset dalam 10 variabel terkemuka, yakni tingkat pendidikan kepala keluarga sementara di Cibulakan pola konsumsi termasuk di dalam 10 variabel terkemuka.

Demikianlah, kami telah menyajikan bukti bahwa indikator kemiskinan antara masing-masing desa sungguh berbeda. Lebih penting lagi, indikator yang spesifik-lokal ini dapat terungkap dengan menggunakan metodologi yang kami terapkan di atas.

XIII. PELAJARAN YANG DIPETIK DARI KETERLIBATAN LOKAL

Kami telah merekrut kader BKKBN di tingkat desa untuk menjadi enumerator CBMS. Perekrutan para enumerator pada awalnya diatur oleh kantor perwakilan BKKBN di daerah. Karena BKKBN Cianjur masih sepenuhnya beroperasi dan didanai oleh pemda setempat, BKKBN tidak mendapatkan masalah dalam mengidentifikasi kader-kader di desa dekat ibu kota Cianjur dan meminta mereka untuk menghadiri pelatihan. Namun, untuk desa-desa lain hanya terdapat satu kader BKKBN.

Sebaliknya, BKKBN Demak tidak memiliki data mengenai kader di setiap desa. Ketika peneliti SMERU mengunjungi desa-desa di Demak pada survey awal, ditemukan bahwa dua desa di Demak tidak pernah memiliki lebih dari dua atau tiga kader. Pengumpulan data BKKBN selalu terutama dilakukan oleh aparat desa dengan bantuan PPLKB.¹⁶ Dengan demikian, tugas perekrutan enumerator dilimpahkan kepada kepala desa di dua desa tersebut, yang dibantu oleh PPLKB dan PLKB. Umumnya mereka menugaskan para aparat desa sebagai enumerator. Selain itu, warga masyarakat dengan pendidikan minimum SLTP dan secara sosial aktif juga direkrut untuk mendapatkan jumlah enumerator yang disyaratkan. Persyaratan ini perlu untuk menjamin agar para enumerator sepenuhnya memahami kuesioner dan mereka yang direkrut adalah yang telah dikenal oleh tetangga-tetangganya. Setiap enumerator melakukan pencacahan di setiap RT tempat tinggalnya atau RT tetangga dalam RW yang sama. Kebijakan ini dilaksanakan untuk menghemat waktu dan menjamin bahwa para enumerator telah dikenal dengan baik dan dipercaya oleh para responden. Terlebih lagi, kebijakan ini juga membantu meminimalkan jumlah responden yang memberikan keterangan palsu karena sangat mungkin para enumerator telah lebih dahulu paham jika responden memberikan keterangan palsu. Dengan demikian, terdapat sedikitnya satu enumerator untuk setiap RT di setiap desa.

Selain menggunakan kader BKKBN, peneliti SMERU juga menugaskan PLKB dan PPLKB untuk mengawasi dan mengkoordinasi pengumpulan data. Seperti telah diketahui, para pengawas ini adalah aparat BKKBN di tingkat desa dan tingkat kecamatan dan pengawas dalam kegiatan pengumpulan data BKKBN pada umumnya. Karena SMERU tetap menggunakan struktur pengumpulan data tradisional BKKBN, PLKB dan PPLKB sepenuhnya terlibat. Selain itu, mereka juga mengumpulkan kuesioner yang telah dilengkapi dan menyusunnya berdasarkan RT-nya masing-masing.

Ada beberapa kesalahan sama yang terjadi di keempat desa tersebut, yakni: (1) enumerator kadang-kadang tidak berhasil mengajukan semua pertanyaan karena merasa telah mengetahui jawabannya (2) mereka memasukkan kode yang salah dalam kuesioner dan (3) beberapa jawaban tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Kesalahan pertama dan ketiga dan kebanyakan kesalahan kedua secara langsung dikoreksi pada hari pertama selama pemeriksaan awal, sementara kesalahan-kesalahan lain dalam pengkodean dikoreksi selama pembersihan data di kantor SMERU.

¹⁶ PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan PPLKB (Pengendali/Penyelia Program Lapangan Keluarga Berencana). Biasanya seorang staf PLKB bertanggung jawab untuk satu desa, sementara staf PPLKB bertanggung jawab untuk semua PLKB di satu kecamatan.

Peneliti SMERU menemukan bahwa tingkat pendidikan para enumerator sangat penting dalam meminimalkan jumlah kesalahan selama pengumpulan data, meskipun tidak sepenting tingkat semangat mereka. Enumerator yang berpendidikan lebih tinggi tidak lebih cermat dibandingkan para enumerator yang berpendidikan lebih rendah namun bersemangat tinggi. Contoh yang tepat adalah para aparat desa. Aparat di dua dari empat desa tidak terlalu bersemangat melakukan pengumpulan data (mereka mau melakukannya karena ada upahnya) dan tidak melakukan pengisian kuesioner secara serius. Akibatnya, kualitas enumerasinya relatif lebih rendah dibanding yang lain dan peneliti SMERU harus melakukan pengecekan kuesioner-kuesioner mereka secara lebih teliti.

Pengalaman melakukan pengumpulan data hanya menjadi penting artinya pada awal pelatihan, di mana enumerator berpengalaman (kader dan aparat desa) dapat memahami isi kuesioner lebih cepat, sementara enumerator yang belum berpengalaman membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, ketika mereka telah memahami kuesioner, pengalaman pengumpulan data seketika menjadi kurang penting.

Meskipun masih terdapat celah untuk perbaikan, kami mencermati bahwa kuesioner yang kami susun cukup sederhana untuk diimbangkan oleh masyarakat lokal. Kami juga mencatat bahwa para aparat BKKBN di tingkat desa dan kecamatan (PLKB dan PPLKB) berpotensi memainkan peran penting dalam menggerakkan penduduk lokal dan mengawasi pengumpulan data. Di pihak lain, aparat desa seharusnya tidak perlu dilibatkan demi lebih memastikan keabsahan data. Terlebih lagi, kami juga menemukan bahwa kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data cenderung lebih banyak dilakukan oleh aparat desa. Di tingkat kabupaten, komitmen dari instansi pemerintah selain BKKBN sangatlah diperlukan, khususnya di wilayah di mana BKKBN tidak lagi berperan.

XIV. KESIMPULAN

Tujuan proyek uji coba ini adalah untuk memperkenalkan sistem pemantauan kemiskinan yang lebih cocok bagi para pembuat kebijakan di Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, baik dari segi geografis maupun dari segi populasinya, maka sistem pemantauan yang baru harus dapat dengan mudah dijalankan dan cepat diproses agar segera dapat menyajikan informasi mengenai kondisi kemiskinan suatu daerah kepada para pemangku kepentingan.

Karena kemiskinan adalah sebuah fenomena lokal, sistem baru yang diperkenalkan proyek ini peka terhadap kondisi kemiskinan lokal dan menjamin peran masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Alasan lain bagi pentingnya keterlibatan masyarakat lokal adalah: sistem ini dapat dilakukan secara simultan di setiap desa di Indonesia. Ini berarti ada kemungkinan bahwa pengumpulan data untuk semua daerah di Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan.

Tujuan utama dari proyek ini adalah mengidentifikasi keluarga miskin di suatu desa, karena itu sangat penting bahwa metodologi yang dipakai dapat dilaksanakan dengan tepat. Karena pencatatan rincian pengeluaran konsumsi keluarga tidak mudah dilakukan, maka kami memanfaatkan 63 indikator sebagai pengganti indikator kesejahteraan. Indikator ini berkisar dari kepemilikan aset dan karakteristik kesehatan hingga pada partisipasi politik dan akses pada informasi. Pemrosesan karakteristik ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Komponen Dasar (PCA) dan menghitung skor kesejahteraan setiap keluarga di keempat desa. Ditemukan bahwa variabel kepemilikan aset merupakan indikator kesejahteraan yang paling signifikan, walaupun pendidikan, kesehatan dan pola konsumsi juga penting.

Satu cara untuk menguji kekuatan skor kesejahteraan adalah dengan mengisolasi keluarga terkaya dan termiskin dan mengamati karakteristik-karakteristiknya. Kami temukan adanya kesenjangan yang besar antara mereka yang dianggap kaya atau miskin di hampir setiap indikator di semua desa tersebut.

Kami simpulkan bahwa metodologi yang kami pilih ini telah berhasil memungkinkan kami mengidentifikasi kelompok miskin di setiap desa. Kami pun telah memperlihatkan bahwa dengan dukungan dan pengawasan yang memadai, masyarakat lokal mampu melakukan pemantauannya sendiri.

Dengan memperkenalkan CBMS, diharapkan para pemangku kepentingan yang tertarik akan mengetahui adanya sistem pemantauan kemiskinan yang relatif akurat, melibatkan masyarakat lokal, dan peka terhadap kekhususan karakteristik lokal, namun tetap objektif, serta dapat dilakukan oleh pemda sehingga membantu mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara efektif.

REFERENSI

- Filmer, Deon dan Lant Pritchett.. "Estimating Wealth Effects without Expenditure Data – or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India." *Demography*, 38(1), hal.115-132. 2001.
- Suryahadi, Asep dan Sudarno Sumarto. "Principles and Approaches to Targeting: With Reference to the Indonesian Social Safety Net Programs." Kertas kerja SMERU. SMERU Research Institute: Jakarta, 2001.
- UNDP Indonesia. *Indonesia Millennium Development Goals Report 2004*, United Nations Development Programme Indonesia: Jakarta, 2003.